

**KEBIJAKAN KONTRA TERORISME PRANCIS MELALUI OPERASI BARKHANE DI
WILAYAH SAHEL TAHUN 2014-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

EKA RACHMALIA

21323261

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**KEBIJAKAN KONTRA TERORISME PRANCIS MELALUI OPERASI BARKHANE DI
WILAYAH SAHEL TAHUN 2014-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

EKA RACHMALIA

21323261

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**Kebijakan Kontra Terorisme Prancis Melalui Operasi Barkhane di Wilayah Sahel
Tahun 2014-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

23 Juni 2025

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 3 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Karina
Karina

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 10 Juni 2025



Eka Rachmalia

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	15
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	15
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2 ANCAMAN TERORISME DI SAHEL	18
2.1. Fakta Terorisme di Sahel	18
2.2. Kebijakan Kontra Terorisme oleh Negara di Kawasan Sahel	23
<i>2.2.1 Kerja Sama Regional G5 Sahel</i>	23
2.3. Misi Stabilisasi Terintegrasi Multinasional PBB di Mali	
(MINUSMA)	29
BAB 3 KEBIJAKAN KONTRA TERORISME OLEH PRANCIS TERHADAP SERANGAN TERORISME DI KAWASAN SAHEL 2014-2022	32
3.1. <i>Defensive Security</i>	32

3.2. Offensive Counterterrorist Operation	36
3.2.1 <i>Penggunaan Diplomasi Kontra Terorisme</i>	37
3.3.2 <i>Penggunaan Intelijen dan Kerja Sama Militer</i>	44
3.3. Law Enforcement and Military Force	48
BAB 4 PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2 Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konferensi yang diadakan di La Celle Saint-Cloud, Prancis.	38
Gambar 2. Konferensi Internasional <i>No Money For Terror</i> .	41
Gambar 3. Cuitan Emmanuel Macron mengenai terbunuhnya al Sahrawi.	53

DAFTAR SINGKATAN

AQIM	: <i>Al Qaeda in the Islamic Maghreb</i>
MUJAO	: <i>The Movement for Unity and Jihad in West Africa Organization</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
MINUSMA	: <i>The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization in Mali</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
AU	: <i>African Union</i>
CONOPS	: <i>Concept of Operation</i>
EIGS	: <i>The Islamic State in Sub-Saharan Africa</i>
MNLA	: <i>The Azawad National Liberation Movement</i>
UE	: <i>Uni Eropa</i>
FTF	: <i>Foreign Terrorist Fighters</i>
GCTF	: <i>Global Counterterrorism Forum</i>
P3S	: <i>The Partnership for Security and Stability in the Sahel</i>
SALW	: <i>Small Arms and Light Weapon</i>
AFD	: <i>Agence Française de Développement</i>
AFDB	: <i>African Development Bank</i>
AFRICOM	: <i>United States Africa Command</i>
ISGS	: <i>Islamic State in the Greater Sahara</i>
JNIM	: <i>Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin</i>
ISSP	: <i>Islamic State Sahel Province</i>
AES	: <i>Alliance of Sahel State</i>

ABSTRAK

Operasi Barkhane merupakan inisiatif kontra terorisme yang diluncurkan oleh Prancis pada tahun 2014 di wilayah Sahel, mencakup negara-negara seperti Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania dan Niger. Operasi ini bertujuan untuk menekan ancaman kelompok teroris dan membantu pasukan Afrika dalam mengamankan wilayah mereka dan mencegah pembentukan atau rekonstruksi tempat perlindungan yang aman bagi teroris. Keterlibatan militer Prancis di Sahel didorong oleh tujuan strategis untuk mencegah penyebaran terorisme yang dapat mengancam keamanan dalam negeri dan mengelola tantangan migrasi yang berpotensi berdampak besar pada stabilitas politik dan sosial Prancis serta Uni Eropa. Penelitian ini menganalisis kebijakan kontra terorisme Prancis dalam konteks Operasi Barkhane dari tahun 2014 sampai 2022. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori kontra terorisme yang dikemukakan oleh Paul R. Pillar yang terbagi menjadi 3 elemen yaitu *Defensive Security*, *Offensive Counterterrorist Operation*, dan *Law Enforcement and Military Force*. Hasil penelitian ini adalah kebijakan kontra terorisme Prancis melalui Operasi Barkhane diantaranya, penguatan terhadap pangkalan militer, kerja sama menggalang bantuan dan kerja sama menggabungkan kekuatan, intelijen, dan operasi militer yang dilakukan secara aktif.

Kata-kata kunci: Operasi Barkhane, Kontra Terorisme, Sahel, Prancis

ABSTRACT

Operation Barkhane is a counter-terrorism initiative launched by France in 2014 in the Sahel region, covering countries such as Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania and Niger. This operation aims to suppress the threat of terrorist groups and assist African forces in securing their territories and preventing the formation or reconstruction of safe havens for terrorists. French military involvement in the Sahel is driven by the strategic objective of preventing the spread of terrorism that could threaten internal security and managing migration challenges that have the potential to have a major impact on the political and social stability of France and the European Union. This study analyzes French counter-terrorism policy in the context of Operation Barkhane from 2014 to 2022. In this study, the author uses the counter-terrorism theory put forward by Paul R. Pillar which is divided into 3 elements, namely *Defensive Security*, *Offensive Counterterrorist Operation*, and *Law Enforcement and Military Force*. The results of this study are French counter-terrorism policies through Operation Barkhane including strengthening military bases, cooperation in raising aid and cooperation in combining forces, intelligence, and military operations that are carried out actively.

Keywords: Operation Barkhane, Counter Terrorism, Sahel, France

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme menjadi salah satu topik dalam hubungan internasional yang menyita perhatian masyarakat. Aksi terorisme dalam dan luar negeri diketahui telah terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Hal ini diakibatkan oleh konflik perebutan kekuasaan antar kelompok kepentingan dalam suatu negara serta konflik kepentingan antar negara dan pihak internasional. Masyarakat global menghadapi ancaman dari basis teroris. Ideologi ekstremis menyebar dan masyarakat lokal tertindas ketika basis-basisnya berubah menjadi surga teroris (France Diplomacy, 2023). Dalam hal ini, Prancis terlibat dalam upaya kontra terorisme, beberapa di antaranya terkonsentrasi di Sahel yang merupakan bekas jajahan Prancis. Istilah Arab "ساحل" sāhil, yang berarti "pantai", adalah sumber dari nama Sahel. Namun, wilayah ini umumnya dikenal sebagai zona semi gurun dan sabana di Afrika Sub Sahara. Sahara merupakan lautan pasir tak berujung yang berada di sebelah utara kawasan Sahel. Sabana hijau yang luas dan subur dapat ditemukan di bagian selatan kawasan Sahel. Negara-negara Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, dan Chad membentuk wilayah Sahel (Suleiman 2017).

Prancis menerapkan kebijakan perang melawan teror sebagai bagian dari tanggung jawabnya menjaga keamanan dan mencegah penyebaran organisasi Islam radikal di benua Afrika. Prancis memiliterisasi wilayah tersebut dan berkolaborasi

sejumlah negara sebagai sekutu dalam perang melawan terorisme. Taktik ini telah digunakan dalam sejumlah operasi militer Prancis (Wing 2016). Prancis telah melakukan lebih dari lima puluh intervensi militer di Afrika sejak memperoleh kemerdekaannya. Selain itu, Prancis secara strategis memandang stabilitas di wilayah Sahel sebagai bagian krusial dari kepentingan keamanan nasionalnya. Kawasan Sahel, yang membentang di sepanjang tepi selatan Sahara, merupakan wilayah yang rawan konflik dan menjadi jalur utama bagi berbagai aktivitas ilegal, termasuk perdagangan senjata, narkoba, dan manusia. Lebih penting lagi, Sahel telah menjadi basis operasi bagi berbagai kelompok teroris seperti AQIM, ISIS, dan Boko Haram yang berpotensi mengancam keamanan regional maupun internasional (Bøås 2019). Bagi Prancis, wilayah Sahel berfungsi sebagai "koridor" yang memungkinkan kelompok-kelompok teroris untuk bergerak dan merencanakan serangan tidak hanya di Afrika tetapi juga di Eropa. Oleh karena itu, menjaga stabilitas di Sahel bukan hanya demi keamanan kawasan tersebut, melainkan juga untuk mencegah ancaman terorisme yang dapat menjangkau daratan Eropa, termasuk Prancis sendiri (Bakowski and Puccio 2016).

Ancaman di wilayah Sahel merupakan aktivitas terorisme. Karena, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh aktor non-negara untuk menimbulkan ketakutan luas dan mempengaruhi nilai politik atau sosial. Sasaran utamanya adalah warga sipil atau target simbolik demi efek psikologis maksimum. Seperti yang sering terjadi di wilayah Sahel yang sering menimbulkan kudeta militer akibat ketidakstabilan politik akibat terorisme. Sedangkan pemberontakan, gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok atau individu terhadap otoritas atau

pemerintahan yang sah. Pemberontakan sering kali muncul dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, ketidakadilan, atau keinginan untuk perubahan politik dan sosial. Para pelaku pemberontakan biasanya bertujuan untuk merebut kekuasaan, mengganti sistem pemerintahan, atau memperjuangkan hak-hak tertentu bagi kelompok mereka (Sholehudin 2015).

Selain ancaman langsung terhadap keamanan, Sahel juga memiliki nilai strategis yang penting bagi geopolitik Prancis. Wilayah ini merupakan penghubung antara Afrika Utara dan Sub-Sahara, serta menjadi rute utama perdagangan legal maupun ilegal. Sahel juga menjadi rute utama migrasi ilegal menuju Eropa. Ketidakstabilan dan konflik di wilayah ini memicu gelombang migrasi besar-besaran yang menimbulkan tantangan sosial, ekonomi, dan politik bagi Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Dengan berperan aktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas Sahel melalui operasi militer seperti Serval dan Barkhane, Prancis berusaha mengendalikan arus migrasi ilegal dan mengurangi risiko yang terkait dengan pergerakan manusia lintas batas secara tidak sah. Secara keseluruhan, keterlibatan militer Prancis di Sahel didorong oleh tujuan strategis untuk mencegah penyebaran terorisme yang dapat mengancam keamanan dalam negeri dan mengelola tantangan migrasi yang berpotensi berdampak besar pada stabilitas politik dan sosial Prancis serta Uni Eropa (Bøås 2021).

Salah satu intervensi yang dilakukan Prancis sebelum Operasi Barkhane yaitu Operasi Serval, pada awal tahun 2013, Mali menghadapi krisis serius setelah kudeta militer pada Maret 2012 yang menggulingkan pemerintah sipil. Kudeta ini melemahkan otoritas pemerintahan pusat dan menciptakan kekosongan kekuasaan,

yang dimanfaatkan oleh pemberontak Tuareg dan kelompok jihad seperti Ansar Dine, AQIM dan MUJAO. Kelompok-kelompok ini berhasil merebut wilayah luas di Mali utara dan mulai bergerak ke selatan, mengancam kota Bamako yang merupakan ibu kota Mali. Ancaman ini membuat komunitas internasional khawatir akan potensi penyebaran terorisme di kawasan Sahel yang lebih luas. Merespons situasi genting ini, pemerintah Prancis meluncurkan Operasi Serval pada Januari 2013 atas permintaan resmi pemerintah Mali. Tujuan utama dari operasi ini adalah membantu Mali merebut kembali wilayah utara yang dikuasai kelompok ekstremis dan mencegah jatuhnya Bamako ke tangan para pemberontak (Boeke and Schuurman 2015). Operasi ini mengerahkan sekitar 3.000 tentara Prancis beserta dukungan udara dan kendaraan lapis baja untuk melakukan serangan cepat dan terkoordinasi. Dalam waktu relatif singkat, pasukan Prancis bersama tentara Mali berhasil merebut kembali kota-kota besar seperti Gao, Timbuktu, dan Kidal. Operasi Serval dianggap sukses secara militer karena mampu menekan kemajuan kelompok jihad dan menjaga stabilitas regional, meskipun ancaman masih tetap ada di wilayah pedesaan dan perbatasan (Spet 2015).

Meskipun Operasi Serval berhasil merebut kembali wilayah utama di Mali utara, ancaman terorisme tidak berhenti di situ. Kelompok ekstremis justru mulai mengalihkan operasi mereka ke daerah perbatasan dan negara-negara tetangga di wilayah Sahel, seperti Niger, Chad, Burkina Faso, dan Mauritania. Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme di Sahel bersifat lintas batas dan membutuhkan pendekatan yang lebih luas dan terpadu. Untuk menjawab tantangan ini, Prancis meluncurkan Operasi Barkhane pada Agustus 2014, menggantikan

Operasi Serval dengan mandat yang lebih besar (Meulen, 2020). Operasi Barkhane dirancang sebagai misi anti-terorisme yang mencakup lima negara G5 Sahel, yakni Mali, Niger, Chad, Burkina Faso, dan Mauritania. Tujuannya adalah mengurangi aktivitas kelompok jihad seperti AQIM, ISIS, dan Boko Haram yang beroperasi lintas negara, serta mendukung pasukan lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi ancaman terorisme. Dalam pelaksanaannya, Operasi Barkhane melibatkan sekitar 5.100 pasukan Prancis dengan markas utama di N'Djamena, Chad. Operasi ini menggunakan kombinasi kekuatan udara, intelijen, logistik, serta kerja sama operasi gabungan dengan militer negara-negara Sahel (Larivé 2014).

Ibu kota Chad, N'Djamena, adalah rumah bagi markas besar Operasi Barkhane. Selain itu, misi ini mencakup fasilitas untuk mengumpulkan intelijen dan melakukan operasi di ibu kota Niger, Niamey, Agadez, Arlit, Tillabery, dan beberapa lokasi lainnya. Untuk menutupi ketidakhadiran pemerintah, Prancis berpartisipasi dalam inisiatif pembangunan lokal, pengumpulan informasi, pelatihan, dan patroli tempur dengan militer Mali dan milisi sekutu. Meskipun demikian, para pejabat Prancis berpendapat bahwa tujuan utama Operasi Barkhane adalah memerangi terorisme di dunia muslim dengan menyerang kelompok teroris di wilayah tersebut seperti AQIM dan ISIS (Lebovich 2021). Tujuan militer Prancis di Sahel adalah untuk membantu pasukan Afrika dalam mengamankan wilayah mereka dan mencegah pembentukan atau rekonstruksi tempat perlindungan yang aman bagi teroris. Tujuan utama pasukan Operasi Barkhane adalah untuk membersihkan wilayah Sahel-Sahara dari kelompok teroris bersenjata dan memberikan tekanan terus-menerus terhadap pemberontak jihad, dengan AQIM sebagai target utama.

Selain itu, pasukan Prancis bermaksud untuk mendukung misi *The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA), memperkuat kekuatan militer negara-negara Sahel, dan membantu pasukan nasional setempat guna menjamin keberhasilan operasi ini.

Selama Operasi Barkhane, Prancis mencapai sejumlah keberhasilan. Pertama, setelah perburuan selama tujuh tahun, Abdelmalek Droukdel yang merupakan ketua AQIM, tersingkir. Selanjutnya, pasukan menguasai kawasan Perbatasan Trois, yaitu segitiga yang dibentuk oleh perbatasan Mali, Burkina Faso, dan Niger serta menjadi tempat pertemuan rapat koordinasi berbagai organisasi jihad. Dorongan militer Barkhane juga menyebabkan kekuatan jihadis menyebar ke wilayah yang luas dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga mencegah kelompok tersebut melakukan operasi skala besar (Doukhan 2022). Meskipun demikian, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pada tahun 2022 bahwa negaranya akan menghentikan upaya anti-teroris di wilayah Sahel dengan Operasi Barkhane. Prancis menyatakan angkatan bersenjata akan meninggalkan Mali. Namun diperkirakan sekitar 3.000 personel militer Barkhane akan tinggal di Nigeria, Chad, dan Burkina Faso. Para prajurit di negara-negara ini hanya berkolaborasi dengan tentara lokal, bukan bertindak atas nama Operasi Barkhane (Schofield 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Prancis melakukan kebijakan kontra terorisme melalui Operasi Barkhane di Wilayah Sahel 2014-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peristiwa teror yang terjadi di wilayah Sahel tahun 2014-2022.
2. Mengetahui upaya kontra terorisme oleh Prancis melalui Operasi Barkhane di Wilayah Sahel 2014-2022.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini dibatasi sesuai dengan identifikasi masalah yang telah disebutkan, agar pembahasan penelitian ini dapat terkonsentrasi pada hal-hal yang krusial untuk memahami pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini berfokus pada upaya Prancis dalam melakukan kebijakan kontra terorisme melalui Operasi Barkhane di Sahel tahun 2014-2022. Penelitian ini difokuskan sejak dijelankannya Operasi Barkhane hingga Prancis mengumumkan Operasi Barkhane berakhir pada masa pemerintahan Emmanuel Macron karena adanya perubahan taktik pada tahun 2022.

Operasi Barkhane yang telah berlangsung sejak tahun 2014 merupakan upaya Prancis untuk mengatasi masalah terorisme serta langkah-langkah untuk menstabilkan keamanan di Wilayah Sahel yang sebagian besar dilakukan oleh tentara Prancis. Adapun para aktor yang terkonsentrasi dalam penelitian ini yaitu Prancis, Chad, Niger, Mali, Burkina Faso dan Mauritania. Dari penelitian ini, juga akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam operasi

Barkhane dimana hal tersebut akan mempengaruhi keadaan stabilitas politik di masing-masing negara di Sahel.

1.5 Tinjauan Pustaka

Selaras dengan judul dari penelitian ini akan membahas mengenai mengapa kebijakan luar negeri Perancis dan upaya kontra-terorisme melalui Operasi Barkhane dalam penanganan aksi kelompok terorisme di wilayah Sahel. Guna memperteguh gagasan dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis meleburkan rancangan penelitian dengan konsolidasi pada sumber-sumber penelitian terdahulu yang dapat menguatkan penelitian ini.

Hussein Salomon dalam bab tulisan "*Terrorism, Counter-Terrorism and the need to problematize the state in Sahel*" dalam buku *Terrorism in Africa New Trends and Frontiers*, menjelaskan bahwa Terorisme di Sahel disebabkan oleh kondisi lokal. Mereka yang menekankan dimensi internasional dibandingkan kondisi lokal menunjukkan ketidaktahuan mereka terhadap dinamika regional dan faktor-faktor yang beragam, warisan otoriter negara kolonial, lingkungan hidup, ekonomi dan politik identitas. Apa yang dibutuhkan di Sahel adalah pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif serta pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan solusi yang lebih holistik untuk mengatasi berbagai tantangan di Sahel. Solusi holistik ini harus menekankan pembangunan dan tata kelola yang lebih baik dibandingkan dengan respons yang berpusat pada militer. Meskipun militer merupakan elemen penting dalam upaya pemberantasan terorisme, penting untuk menyadari bahwa kekerasan tidak dapat menggantikan kebutuhan

mendesak akan pemerintahan yang lebih baik, pembangunan ekonomi yang lebih besar, dan inklusi politik (Salomon, 2021). Perbedaan penelitian yang akan saya ditulis terletak pada kondisi terorisme di Sahel, penelitian yang akan saya tulis tidak hanya mengacu pada kondisi lokal saja di kawasan Sahel, tetapi mencakup pada kondisi eksternal yang memicu terorisme di wilayah tersebut.

Literatur yang kedua yang digunakan sebagai tinjauan pustaka yakni Jurnal yang berjudul *“The G5 Sahel: Security Implementation and Challenges”* pada literatur ini yang ditulis oleh Alassane Camara pada tahun 2020, menjelaskan bahwasannya tantangan yang beragam dan kompleks menghambat kemajuan wilayah Sahel menuju stabilitas dan keamanan. Konteks ketidakamanan di kawasan, yang disebabkan oleh tidak adanya negara, kehadiran kelompok teroris, krisis internal yang berkepanjangan, kemiskinan penduduk, dan tata kelola yang buruk masih menjadi tantangan utama bagi negara-negara di kawasan Sahel. Saat ini pertempuran di Sahel tidak hanya menjadi masalah yang berdampak pada negara-negara Sahel tetapi juga seluruh dunia dan kita harus menggabungkan upaya kita untuk membentuk kekuatan bersama untuk memberantas bahaya terorisme, kejahatan terorganisir dan kelompok jihad (Camara, 2020). Pada penelitian ini belum dipaparkan konteks ketidakamanan kawasan di wilayah Sahel apakah hanya kehadiran kelompok teroris saja tetapi ada faktor lain dari negara Prancis sendiri yang melakukan aksi kontra terorisme di wilayah tersebut.

Literatur yang ketiga yang digunakan sebagai tinjauan pustaka yakni Jurnal yang berjudul *“The Foreign Security Policy in Africa: France in Sahel Region”* pada literatur ini yang ditulis oleh Sylvain Medessoukou pada tahun 2018, menjelaskan

bahwa kebijakan keamanan Perancis mempengaruhi perkembangan keamanan regional di G5 Sahel dengan menerapkan gagasan kompleks keamanan regional. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengatasi masalah keamanan di Sahel belum cukup. Satu-satunya bidang yang menjadi fokus strategi keamanan Perancis adalah kekuatan militer. Keamanan kawasan G5 Sahel dianggap tidak kompeten karena desakan Prancis untuk mencapai tujuannya di luar sarana militer dan mengabaikan pengawasan angkatan bersenjata regional (Medessoukou 2018). Akibatnya, kebijakan Perancis dianggap tidak berhasil. Meskipun kegagalan resolusi konflik di Sahel merupakan tema umum, terdapat perbedaan mencolok dalam literatur ini, khususnya dalam inti pembahasan yang berpusat pada kesalahan kebijakan keamanan Perancis yang diterapkan di wilayah tersebut.

Literatur yang keempat yang digunakan sebagai tinjauan pustaka yakni Jurnal yang berjudul "*French Intervention in Mali: strategic alliances, long term regional presence*" pada literatur ini yang ditulis oleh Susanna D.Wing pada tahun 2016, Penulis mengkaji gagasan intervensi militer dan kontra terorisme, dengan berkonsentrasi pada taktik Prancis dalam menggambarkan konflik Mali dengan cara yang sesuai dengan kepentingannya. Analisis terhadap isu-isu yang diangkat dalam literatur ini mengarah pada kesimpulan bahwa situasi Mali adalah situasi yang rumit. Dengan melaksanakan rencana perang regional melawan teror, Prancis berharap dapat mengalihkan perhatian dari masalah internalnya di Mali dengan mengganti nama misi dari Operasi Serval menjadi Operasi Barkhane. Prancis telah memberikan penjelasan yang bertentangan karena kurangnya pemahaman mereka tentang penyebab

pemberontakan bersenjata dan konflik yang sedang berlangsung, dan menyebut pembangunan militernya di Sahel sebagai inisiatif kontra terorisme (Wing, 2016). Pada literatur tersebut memiliki kesamaan yang terletak pada kesimpulan konflik yang akhirnya Prancis gagal dan memberhentikan operasi barkhane di Mali. Perbedaan dengan penelitian yang saya gunakan terletak pada wilayah yang digunakan, pada penelitian yang saya gunakan mencakup wilayah G5 Sahel yang merupakan keseluruhan dari operasi barkhane tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kontra terorisme untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana Prancis melakukan kebijakan kontra terorisme melalui operasi barkhane di wilayah Sahel 2014-2022. Menurut Paul R. Pillar bahwa kontra terorisme adalah upaya untuk membatasi kapasitas teroris dalam melakukan serangan. Label “Kontraterorisme” tidak mencakup semua tindakan yang diambil untuk memerangi terorisme. Apapun yang menghilangkan akar atau melemahkan penyebab terorisme sudah sepantasnya dipandang sebagai tindakan kontra terorisme. Pemerintah dapat memulai perang gagasan melawan ideologi ekstremis dan mempromosikan reformasi politik dan sosial untuk mengurangi apa yang dianggap sebagai penyebab terorisme (Pillar 2008).

Paul R. Pillar membagi upaya kontra terorisme ke dalam beberapa elemen, salah satunya adalah dengan mengurangi kapabilitas kelompok teror yang didalamnya terbagi menjadi beberapa instrumen yaitu (Pillar, 2008):

1. ***Defensive Security***, Elemen ini dilakukan sebagai upaya melindungi target dari serangan sehingga seringkali dilabeli anti terorisme. Tindakan perlindungan tersebut diantaranya perlindungan terhadap lokasi tertentu seperti gedung dan perkantoran, pangkalan militer, kedutaan besar atau fasilitas lainnya yang menjadi sasaran teroris. Namun, tidak semuanya bisa dilindungi padahal semuanya berpotensi menjadi sasaran para teroris. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pertahanan meskipun tidak dapat secara langsung mengalahkan upaya serangan, tetapi dapat menghalangi teroris untuk menyerang. Di sisi lain negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara untuk menahan teroris melakukan serangan teror dan meningkatkan keamanan dalam negeri (Pillar 2008, 380).

2. ***Offensive Counterterrorist Operations***, Dalam kontra terorisme, elemen ini melibatkan penggunaan aspek yang berbeda. Dimana kedua elemen defensive dan offensive saling melengkapi dan memberikan alternatif lain berdasarkan tindakan dan penggunaannya. Pillar menjelaskan bahwa seiring dengan semakin berkembangnya dunia kontemporer, diplomasi telah muncul sebagai instrumen penting untuk menjaga kolaborasi dalam memerangi terorisme. Dalam hal ini, diplomasi dapat digunakan negara untuk melawan teroris yang seringkali melintasi batas-batas internasional. Diplomasi dapat membantu dalam kerja sama militer, keamanan dan badan intelijen. Intelijen memberikan kontribusi yang besar terhadap kontra terorisme, yaitu dalam membentuk kebijakan luar negeri dan strategi keamanan nasional yang efektif. Hal yang

penting termasuk mengintai pasokan dana teroris yang sewaktu-waktu dapat dibekukan dan penyitaan aset teroris (Pillar 2008, 382).

3. *Law Enforcement and Military Force*, Elemen ini menekankan pada kekuatan militer yang mengarah pada situasi perang dimana negara mendapatkan intimidasi oleh kelompok teroris yang dianggap membahayakan kedaulatan negara, maka hukum dan militer sebagai jalan keluarnya. Dalam hal ini, penggunaan kekuatan militer dalam operasi kontra terorisme merupakan versi yang lebih kuat dari daya tarik penggunaan sistem peradilan pidana. Dibandingkan dengan tuntutan, serangan militer mampu mendeklarasikan tujuan yang lebih dramatis. Hal ini dapat segera mengganggu atau menghancurkan kemampuan teroris, seperti kamp pelatihan dan membunuh teroris utama. Tindakan tersebut dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi kelompok teroris tetapi juga bagi negara. Dan hal tersebut dapat dilakukan tanpa adanya kerumitan administratif, pembuktian dan komplikasi hukum yang seringkali menghambat proses tuntutan pidana (Pillar 2008, 385).

Berdasarkan ketiga parameter tersebut yang kemudian akan digunakan penulis untuk menganalisis penelitian ini dengan menggunakan paradigma kontra terorisme oleh Paul R. Pillar terkait kebijakan kontra terorisme oleh Prancis menggunakan operasi barkhane di wilayah Sahel tahun 2014-2022.

1.7 Argumen Sementara

Merujuk pada teori kontra terorisme di atas, Penulis berpendapat bahwa Prancis mengambil kebijakan dalam mempertahankan intervensi militer Operasi Barkhane di Sahel atas dasar untuk memerangi kelompok bersenjata ekstremis di kawasan Sahel termasuk Al-Qaeda dan ISIS, selain itu Prancis juga mendukung negara-negara G5 (Mali, Niger, Burkina Faso, Chad, dan Mauritania) dalam memperkuat kapasitas militer mereka. Berdasarkan tiga elemen dari teori yang dikemukakan Paul R. Pillar pada elemen *Defensive Security*, Prancis menggunakan operasi barkhane di wilayah sahel yang sering menjadi ancaman teroris, upaya yang dilakukan Prancis diantaranya penambahan pasukan Prancis, menggunakan taktik pangkalan militer sementara dan menambahkan bantuan udara seperti helikopter dan pesawat tempur.

Pada elemen *Offensive Counterterrorist Operations*, operasi barkhane secara strategis bermitra dengan negara-negara utama di kawasan Sahel-Sahara yang tergabung dalam G5 Sahel, mendorong respons regional yang terkoordinasi terhadap tantangan keamanan dan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teroris bersenjata. Elemen terakhir yakni *Law Enforcement and Military Force*, Prancis menggunakan pasukan militernya di kawasan Sahel yang secara aktif melakukan operasi barkhane dari tahun 2014-2022, dibantu dengan kendaraan logistik, tank, jet tempur, dan pesawat kargo dengan tujuan membasmi sarang teroris di kawasan Sahel-Sahara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan menggunakan metode kualitatif dengan basis studi kepustakaan yang menekankan penggabungan data terkait operasi barkhane oleh Prancis melalui teori kontra terorisme untuk mencapai tujuan penelitian.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian yang diambil adalah negara Prancis selaku pembuat kebijakan, sedangkan objek yang digunakan kebijakan kontra terorisme yang diluncurkan oleh Prancis kepada negara-negara di wilayah Sahel dengan menggunakan Operasi Barkhane.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pengumpulan studi literatur dengan menggunakan data sekunder seperti artikel, jurnal, laporan, berita dan dokumen resmi. Diantaranya kajian literatur yang digunakan dalam bentuk buku salah satunya yang berjudul “Terrorism in Africa New Trends and Frontiers”.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan menggunakan riset terhadap operasi barkhane yang dilakukan oleh Prancis. Untuk melakukan penelitian, dikumpulkan data-data yang relevan, dihubungkan dengan teori kontra terorisme, dan data sekunder dikumpulkan untuk membantu prosesnya.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab pertama membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, hingga metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, proses penelitian dan ditutup dengan sistematika penelitian yang berisi rangkaian isi dari penelitian.

BAB 2: ANCAMAN TERORISME DI SAHEL

Pada bab kedua akan menelaah tentang ancaman terorisme di wilayah Sahel dan terdapat sub bab yang melampirkan fakta terorisme di sahel yang mencakup aktor dan dampak terorisme di sahel, sub bab berikutnya mencakup kebijakan kontra terorisme oleh negara di kawasan Sahel dan sub bab terakhir akan membahas mengenai peran Prancis dalam tindakan kontra terorisme di wilayah Sahel 2014-2022.

BAB 3: KEBIJAKAN KONTRA TERORISME OLEH PRANCIS TERHADAP SERANGAN TEROR DI KAWASAN SAHEL 2014-2022

Bab ketiga akan menganalisis mengapa Prancis melakukan kontra terorisme melalui operasi barkhane di wilayah Sahel antara tahun 2014 sampai 2022 dengan melihat teori kontra terorisme oleh Paul R Pillar.

BAB 4: PENUTUP

Bab keempat akan mencakup hasil dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya terkait penelitian tentang operasi barkhane sebagai upaya kontra terorisme oleh Prancis di Wilayah Sahel antara tahun 2014-2022. Tujuan bab ini adalah untuk

memberikan gambaran singkat tentang temuan penelitian yang tercakup dalam bab sebelumnya.

BAB 2

ANCAMAN TERORISME DI SAHEL

2.1. Fakta Terorisme di Sahel

Wilayah Sahel, yang mencakup negara-negara seperti Mali, Burkina Faso, Niger, dan Chad, telah menjadi pusat perhatian global terkait dengan ancaman terorisme. Menurut Global Terrorism Index (GTI), terorisme didefinisikan sebagai ancaman atau penggunaan kekuatan dan kekerasan ilegal oleh aktor non-negara untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, religius, atau sosial melalui ketakutan, pemaksaan, atau intimidasi. Sejak awal 2010-an, kawasan ini mengalami peningkatan signifikan dalam aktivitas kelompok teroris, yang sebagian besar dipicu oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi. Krisis keamanan di Sahel dimulai dengan kebangkitan kelompok-kelompok bersenjata seperti AQIM dan Boko Haram. Sejak 2012, setelah intervensi Prancis dalam konflik Mali, situasi semakin memburuk dengan munculnya berbagai kelompok jihadis yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan ketidakpuasan masyarakat. Prancis meluncurkan Operasi Serval pada 2013 untuk membantu pemerintah Mali melawan pemberontakan di utara. Namun, operasi ini berkembang menjadi Operasi Barkhane pada 2014, Operasi ini bertujuan menanggulangi ancaman terorisme di wilayah Sahel yang semakin meningkat pasca krisis Mali 2012, ketika kelompok-kelompok militan Islam mengambil alih bagian utara negara tersebut. Situasi keamanan yang memburuk memicu kebutuhan akan strategi kontra-terorisme regional yang melibatkan negara-negara Sahel lainnya,

yakni Burkina Faso, Niger, Chad, dan Mauritania. Operasi Barkhane difokuskan untuk mengatasi ancaman dari kelompok-kelompok jihad seperti AQIM, JNIM, dan ISGS (Doxsee et al. 2022).

Aktor yang berperan dalam kontra terorisme di wilayah Sahel melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional, dengan fokus utama pada kerjasama militer dan keamanan. Aktor utama yaitu Prancis yang menggunakan Operasi Barkhane untuk melawan terorisme di Sahel. Operasi Barkhane merupakan upaya anti pemberontakan yang dimulai pada 1 Agustus 2014. Militer Prancis mengawasi kampanye melawan organisasi Islam di Sahel Afrika. Terdiri dari sekitar 5.100 tentara Prancis yang ditempatkan secara permanen di ibu kota Chad, N'Djamena, tiga drone, enam pesawat tempur, 200 mobil lapis baja, dan alat transportasi lainnya. Prancis memandang terorisme sebagai ancaman lintas batas yang memerlukan kerjasama global. Perspektif ini didasarkan pada pemahaman bahwa akar penyebab terorisme, seperti konflik bersenjata, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan radikalisasi ideologi, sering kali berasal dari wilayah di luar perbatasan Prancis. Dalam hal ini, wilayah Sahel di Afrika menjadi salah satu fokus utama Prancis. Dengan meluncurkan operasi militer seperti Operasi Barkhane, Prancis berupaya menekan kelompok-kelompok teroris yang berbasis di Sahel, seperti Al-Qaeda di Maghreb Islam (AQIM) dan Negara Islam di Sahara Besar (ISIS-GS). Pendekatan ini mencerminkan keyakinan Prancis bahwa stabilitas di Sahel memiliki dampak langsung terhadap keamanan di Eropa (Perre and Tessier 2019).

Selain upaya militer, Prancis juga terlibat dalam inisiatif diplomatik dan pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab terorisme. Melalui

kemitraan dengan negara-negara G5 Sahel dan dukungan dari Uni Eropa, Prancis mempromosikan kebijakan yang mengintegrasikan keamanan, pembangunan, dan tata kelola yang baik. Namun, pendekatan ini sering kali menghadapi kritik, baik dari dalam negeri maupun internasional, yang menilai bahwa fokus Prancis pada solusi militer sering kali mengabaikan dimensi sosial dan ekonomi yang lebih mendalam. Upaya pemberantasan terorisme di kawasan Sahel juga melibatkan organisasi internasional seperti PBB. Ancaman terorisme semakin meningkat, meskipun terdapat fakta bahwa operasi perdamaian PBB jarang secara khusus ditujukan untuk memerangi terorisme dan ekstremisme kekerasan. Misalnya, MINUSMA telah berkolaborasi atau berada di dekat operasi kontra terorisme Prancis, Operasi Barkhane, Pasukan Gabungan G5-Sahel, Satuan Tugas Eropa Takuba, yang mendampingi dan memberi nasihat kepada pasukan Mali, dan misi pelatihan lainnya di Mali. Pasukan keamanan dan pertahanan Mali dilatih oleh Uni Eropa (Hunt and Zimmerman 2022).

Kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di wilayah Sahel, seperti Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) dan Islamic State in the Greater Sahara (ISGS), memiliki beragam motif dan kepentingan yang mendorong aktivitas mereka. Motif utama mereka berakar pada ideologi agama yang ekstrem. JNIM, afiliasi dari Al-Qaeda, bertujuan untuk mendirikan sistem pemerintahan berbasis syariah, menggantikan pemerintahan lokal yang mereka anggap korup dan tidak Islami. Sementara itu, ISGS yang berafiliasi dengan ISIS, membawa ambisi yang lebih luas untuk menciptakan kekhalifahan lokal yang terhubung dengan jaringan global ISIS. Kedua kelompok ini memanfaatkan agama sebagai alat mobilisasi dan propaganda,

menggunakan narasi bahwa mereka adalah pembela Islam melawan pemerintahan sekuler dan kekuatan asing. Sebuah laporan dari Global Terrorism Index 2024 menyebutkan bahwa lebih dari 60% serangan kelompok-kelompok ini menargetkan fasilitas pemerintah dan militer, mencerminkan keinginan mereka untuk melemahkan tatanan negara (Vision Of Humanity, n.d.)

Wilayah Sahel, telah menjadi pusat aktivitas terorisme yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dampak terorisme di kawasan ini sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat Sahel hidup dalam ketakutan akibat serangan teroris yang sering terjadi, yang mengganggu kehidupan sehari-hari dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi keamanan. Hal tersebut berdampak pada timbulnya permasalahan kemanusiaan yang lebih parah, masalah tersebut terdiri atas:

1. Kematian dan Kekerasan Meningkat

Sejak Operasi Barkhane dimulai pada 2014, wilayah Sahel terutama Mali, Burkina Faso, dan Niger mengalami eskalasi kekerasan yang dramatis. Berdasarkan data dari Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), jumlah korban konflik melonjak dari sekitar 456 jiwa pada tahun 2014 menjadi 6.276 jiwa pada 2020 mengalami peningkatan sekitar 1.376% hanya dalam enam tahun Pada 2022, korban tewas mencapai sekitar 9.000 jiwa setengah dari jumlah ini terjadi pada wilayah barat Sahel.

2. Ketidakstabilan Politik

Ketidakstabilan politik yang serius diakibatkan oleh meningkatnya kekerasan. Ketidakmampuan beberapa pemerintahan Sahel untuk mengatasi

ancaman teroris telah mengakibatkan pengambilalihan kekuasaan oleh militer, seperti yang terjadi di Burkina Faso dan Mali. Dua kali pada tahun 2022, personel militer mengambil alih kekuasaan, sehingga meningkatkan kerusuhan politik dan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintahan Burkina Faso sementara dipimpin oleh Kapten Letkol Paul-Henri Damiba, yang dilantik sebagai presiden pada bulan Maret. Pada bulan September, Ibrahim Traore mengeluarkannya. Traoré mulai merekrut 50.000 "sukarelawan pertahanan sipil" setelah merebut kekuasaan. Kekerasan dan ketidakamanan yang lebih besar diakibatkan oleh berkembangnya organisasi-organisasi main hakim sendiri dengan cepat. Amerika Serikat menanggapi dengan menghapus Burkina Faso dari program-program yang mendorong perdagangan antara kedua negara dan memotong bantuan sebesar \$160 juta kepada negara tersebut (International Rescue Committee 2023).

3. Krisis Kemanusiaan

Sebuah penelitian PBB menyatakan bahwa wilayah Sahel yang dilanda kekeringan di Afrika Barat adalah tempat dimana krisis kemanusiaan berada pada titik terburuknya. Lebih dari 860.000 orang terpaksa meninggalkan desa mereka di Burkina Faso, Mali, dan Niger karena ketidakamanan yang disebabkan oleh meningkatnya kekerasan ekstremis. Ketika negara ini berubah menjadi medan pertempuran baru bagi para ekstremis yang terkait dengan ISIS dan Al Qaeda, hampir setengah juta orang telah mengungsi di Burkina Faso. Lebih dari 2,6 juta orang di Burkina Faso, Mali, dan Niger telah menerima bantuan dari *World Food Programme*. Sekitar

20 juta orang yang tinggal di negara-negara yang terkena dampak konflik membutuhkan sekitar \$150 juta (VOA Indonesia 2019).

4. Krisis Pangan Meningkat

Pertanian menjadi tantangan di Burkina Faso utara karena kekerasan. Selain itu, inflasi harga pangan mencapai 30%, yang merupakan salah satu yang tertinggi secara global. Di bagian utara dan timur Burkina Faso, terdapat kerawanan pangan yang parah. Beberapa rumah tangga di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata mengalami kerawanan pangan ekstrem dan berada di ambang kelaparan (International Rescue Committee 2023).

2.2. Kebijakan Kontra Terorisme oleh Negara di Kawasan Sahel

2.2.1. Kerja Sama Regional G5 Sahel

Meskipun Afrika kaya akan sejarah dan kekayaan, kemajuan benua ini terhambat oleh perang saudara, keterbelakangan pembangunan, tata kelola yang buruk, dan ketidakamanan. Tujuan dari konteks G5 Sahel adalah untuk menunjukkan bagaimana lima negara anggota berupaya melindungi wilayah Sahel mereka. Salah satu penyebab utama memburuknya keamanan di Sahel adalah krisis Mali pada tahun 2012, yang telah menyebar ke negara-negara perbatasan yang lebih terisolasi seperti Niger dan Burkina-Faso di wilayah yang disebut Liptako-Gourma atau zona tiga perbatasan. Sahel Five Group atau juga dikenal sebagai G5 Sahel, adalah organisasi kerangka kelembagaan yang didirikan oleh Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger selama KTT Sahel di Nouakchott, pada 14-17 Februari 2014. (Sahel, 2014).

G5 Sahel dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya tantangan keamanan yang dihadapi oleh negara-negara di wilayah Sahel. Wilayah ini telah lama menjadi pusat aktivitas kelompok teroris, termasuk al-Qaeda dan ISIS, serta mengalami berbagai masalah seperti konflik bersenjata, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas. Negara-negara di kawasan ini menyadari bahwa tantangan tersebut tidak dapat diatasi secara unilateral dan memerlukan pendekatan kolaboratif. Sebagai hasil dari kebutuhan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara negara-negara anggota dalam menghadapi ancaman terorisme dan kejahatan terorganisir, serta untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. G5 Sahel juga berfungsi sebagai platform untuk koordinasi kebijakan dan strategi keamanan, serta untuk menarik dukungan internasional.

Mengingat gawatnya situasi keamanan di Sahel, tindakan segera diperlukan sehingga memerlukan respons yang lebih komprehensif dan inklusif. G5 Sahel telah lama mengkampanyekan pembentukan koalisi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap negara-negara Sahel. Dengan mengambil strategi yang terkoordinasi, aliansi ini berharap dapat meningkatkan dan memaksimalkan bantuan internasional sembari mendorong pembagian dan interaksi persyaratan keamanan. Menghilangkan akar permasalahan krisis adalah tujuan utamanya. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan administrasi dan pelayanan pemerintah, serta tuntutan pembangunan; keamanan saja bukanlah jawabannya. Di tingkat regional, Koalisi Internasional Sahel menganjurkan strategi komprehensif yang melibatkan semua partai Sahel. Aktor di bidang politik, keamanan, militer, dan pembangunan (VOA Indonesia 2019). Aliansi

ini menjamin kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan membantu memfasilitasi akses penuh terhadap bantuan kemanusiaan. sebuah koalisi dalam skenario bencana kemanusiaan dan keamanan yang dibangun di atas empat pilar yang saling melengkapi. Keempat pilar pelengkap koalisi Sahel masing-masing digerakkan secara individual. Memerangi organisasi teroris adalah pilar pertama, mengkoordinasikan semua inisiatif peningkatan kapasitas pertahanan untuk negara-negara G5 Sahel adalah pilar kedua, pilar ketiga yakni dukungan untuk membangun kembali peran pemerintah dan negara di kawasan, serta pilar keempat merupakan bantuan pembangunan (Sahel Alliance, n.d.)

Mengingat masalah-masalah umum ini dan meningkatnya serangan teroris yang mengganggu stabilitas kawasan, negara-negara G5 Sahel harus menemukan solusi politik dan militer. Pada tanggal 20 November 2015, kepala negara wilayah G5 Sahel mengumumkan pembentukan organisasi kolaboratif G5 Sahel, juga dikenal sebagai *Force Conjointe du G5 Sahel* (FC G5 Sahel), sebuah organisasi militer kolaboratif anti-teroris yang mencerminkan tekad para pemimpin Sahel untuk mengambil alih kekuasaan dan keamanan mereka sendiri. Sayangnya, FC G5 Sahel hanya berlaku hingga Februari 2017. Uni Afrika mengaktifkan kembali dan mengakuinya pada bulan April 2017, dan Dewan Keamanan PBB mengkonfirmasi pada tanggal 21 Juni 2017, ketika Prancis mengeluarkan resolusi 2359. Pada tanggal 2 Juli 2017, presiden dari lima negara bagian Sahel yang menghadapi ancaman teroris secara resmi membentuk Pasukan Gabungan G5 Sahel (United Nations 2017).

Pasukan gabungan G5 Sahel merupakan kekuatan militer yang berada di bawah naungan G5 Sahel, sebuah organisasi sub regional yang dibentuk pada Februari 2014 untuk meningkatkan kerja sama seputar pembangunan dan menyatukan tindakan kolektif melawan ancaman bersama seperti kelompok bersenjata teroris dan kejahatan terorganisir. Hal ini termasuk dalam kategori yang disebut oleh Uni Afrika sebagai “koalisi inisiatif keamanan *ad hoc*”, yang disetujui namun tidak diwajibkan oleh Dewan Perdamaian dan Keamanan dan yang menetapkan perjanjian keamanan yang memperbolehkan inisiatif keamanan *ad hoc*. Kekuatan untuk melakukan operasi lintas batas untuk menargetkan ancaman bersama. Pasukan gabungan G5 Sahel adalah instrumen serbaguna yang dirancang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ancaman dan perubahan berdasarkan tujuan intervensi. Memerangi terorisme, organisasi kriminal transnasional, dan perdagangan manusia di kawasan G5 Sahel adalah mandatnya. Tentara Burkina-Faso, Mali, dan Niger melancarkan Operasi Hawbi pada bulan November 2017 sebagai operasi perdananya. Serangan kedua yang dikenal dengan Pagnali dilakukan pada Januari 2018 di wilayah perbatasan Mali-Burkina Faso dengan tujuan mengganggu pergerakan dan menghilangkan jaringan pasokan kelompok bersenjata teroris. Dengan tujuh batalyon yang tersebar di sepanjang sumbu Barat, Tengah, dan Timur, pasukan gabungan mengumpulkan 5.000 tentara dengan kapasitas operasional penuh. Yang dapat melintasi batas bersama di kedua sisi dengan jarak 50 kilometer (Africa Union Commission 2017).

Selanjutnya, *Concept of Operation* (CONOPS) dibuat oleh G5 Sahel dan didukung oleh dewan keamanan perdamaian *African Union* (AU) pada 13 April 2017. Seluruh komponen strategi stabilisasi tercakup dalam misi ini, yang memadukan pemberantasan terorisme dengan tugas-tugas yang tidak terlalu menuntut seperti membantu pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Kewajiban para pelaku seperti pemerintah federal dan mitra luar adalah aspek lain dari tugas ini. Mengidentifikasi dan menghilangkan organisasi teroris yang menjadi perhatian, menghentikan perdagangan manusia, mengganggu rantai pasokan, dan memutus dukungan keuangan kelompok tersebut adalah prioritas utama saat ini. Mengisolasi organisasi teroris dan kriminal untuk mencegah mereka memiliki basis dukungan, menghilangkan organisasi-organisasi ini, menjaga masyarakat lokal, dan mempertahankan kontrol teritorial adalah beberapa contoh operasi khusus CONOPS. Menjadikan militer nasional lebih permanen di pos-pos perbatasan adalah tujuan lain dari kekuatan terpadu ini (Camara 2020).

Kolaborasi kekuatan mitra yang memulai operasi di wilayah Sahel, khususnya di Mali utara, selama krisis tahun 2012 merupakan landasan kontribusi penting G5 Sahel terhadap konsolidasi keamanan. Pasukan Gabungan G5 Sahel mendukung operasi militer barkhane oleh Prancis, misi MINUSMA PBB, dan misi pelatihan Uni Eropa di Mali. Dalam upaya ini, harus diakui bahwa mandat keamanan G5 Sahel tidak dapat dipenuhi tanpa dukungan dari luar. G5 Sahel memerlukan bantuan pendanaan, pasokan, dan logistik karena merupakan organisasi yang baru didirikan. Kepala Negara dari kawasan G5 Sahel dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyoroti berbagai penjelasan mengenai visi baru kerja sama selama konferensi

PAU, karena berkembangnya kelompok Jihadis, Perancis sering dikritik atas keterlibatannya oleh penduduk negara-negara anggota G5 Sahel. Perancis memainkan peran penting dalam pertempuran melawan organisasi bersenjata teroris di Sahel dan merupakan mitra strategis dalam dukungan ini (Camara 2020).

Konferensi PAU atau Sommet de Pau merupakan sebuah pertemuan penting yang berlangsung pada 13 Januari 2020 di Pau, Prancis, yang melibatkan para pemimpin negara-negara anggota G5 Sahel dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas situasi keamanan di wilayah Sahel yang dilanda konflik dan serangan teroris. Salah satu hasil utama dari pertemuan ini adalah pembentukan "Coalition pour le Sahel", sebuah inisiatif untuk mengkoordinasikan upaya militer dan keamanan di kawasan tersebut. Para pemimpin sepakat untuk meningkatkan pelatihan militer bagi angkatan bersenjata negara-negara Sahel dan meminta dukungan dari negara-negara lain dalam upaya ini (Pascal 2020).

Pertemuan ini juga menekankan pentingnya fokus pada daerah "tiga perbatasan" antara Mali, Niger, dan Burkina Faso, yang merupakan pusat aktivitas kelompok teroris. Para pemimpin berkomitmen untuk memperkuat kehadiran negara dan layanan publik di wilayah yang telah kehilangan otoritas pemerintah (BBC 2020). Dalam rangka mendukung operasi Barkhane, Prancis mengumumkan pengiriman tambahan 220 tentara ke kawasan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperkuat upaya melawan kelompok teroris, khususnya *The Islamic State in Sub-Saharan Africa* (EIGS) (iRiS 2020).

2.3. Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensi PBB di Mali (MINUSMA)

Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2100 yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2013, *The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization in Mali* (MINUSMA) secara resmi dibentuk pada tanggal 1 Juli 2013 dengan tujuan membantu proses politik dan menyelesaikan tugas keamanan di wilayah Mali, Afrika Barat. Gabungan kekuatan militer dari negara-negara anggota PBB menjalankan misi penjaga perdamaian PBB yang dikenal dengan MINUSMA. Karena PBB pada dasarnya tidak mempunyai pasukan sendiri, kontribusi negara-negara anggota sangatlah penting. PBB memahami bahwa sejumlah besar pasukan diperlukan untuk melindungi warga dan mencegah dampak buruk konflik guna menghentikan krisis di Mali agar tidak bertambah buruk (Bergamaschi, 2014).

Konflik di wilayah Mali yang memicu ketegangan dan membahayakan kondisi politik, keamanan, dan sosial ekonomi serta melanggar hak asasi manusia menjadi pendorong terbentuknya MINUSMA (Dewan Keamanan, 2013). Berkembangnya konflik rumit yang dilakukan oleh banyak pemain dan organisasi inilah yang menyebabkan keadaan berbahaya ini. Struktur negara kini berada dalam krisis dan melemah akibat fenomena munculnya aktor dan kelompok pemberontak di Mali utara. Tiga permasalahan yang menjadi penyebab krisis Mali yakni Kelompok suku Tuareg di Mali Utara bertanggung jawab atas krisis pertama melalui tindakan separatisme. Yang kedua adalah krisis politik yang disebabkan oleh pemecatan Presiden Amadou Toumani Touré oleh Junta Militer. Ketiga, organisasi Jihadis Islam berupaya menerapkan hukum syariah di Mali utara (Francis, 2013).

Mali meminta bantuan dari Prancis pada tahun 2013 karena situasi keamanan negara yang memburuk. Kelompok pemberontak yang dikenal sebagai *The Azawad National Liberation Movement* (MNLA) telah bermitra dengan organisasi teroris di Mali untuk menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut. Sebagai tanggapan, Prancis bertindak sesuai harapan Mali, dengan secara efektif mengalahkan organisasi teroris dan mengakhiri gerakan pemberontakan. Mali dan Prancis mencapai kesepakatan pada Juli 2014 untuk bekerja sama melakukan operasi kontra terorisme di Mali. Selain itu, kerja sama ini juga bermaksud untuk melindungi operasi luar negeri yang telah beroperasi sebelumnya, khususnya MINUSMA.

Kerangka keamanan telah diperluas sebagai akibat dari meluasnya masalah terorisme. Melalui G5 Sahel, Prancis menciptakan kerangka kerja sama regional dalam memerangi terorisme. Hal ini berarti operasi melawan terorisme dapat diperluas ke seluruh Sahel, dan Mali tetap menjadi pusat operasionalnya. Karena lokasinya di tengah Sahel, Mali memainkan peran geopolitik yang penting dalam pertumbuhan terorisme di wilayah tersebut. Organisasi teroris dapat menyebar dan menyebar dengan mudah di Mali Utara karena kurangnya pengawasan dan kontrol. Berbagai permasalahan dan lambatnya pembangunan infrastruktur memperburuk keadaan ini, sehingga perjalanan udara biasanya merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut (Shurkin et al. 2017).

Pertumbuhan kampanye anti-teroris di Mali berkontribusi pada peningkatan stabilitas politik dan keamanan negara tersebut (Franco 2021). Pemilu demokratis tahun 2013 menjadi buktinya. Selain itu, Prancis juga merekrut mitra dari Uni Eropa untuk membantu kekuatan militer Mali menjadi lebih baik sehingga mereka bisa

lebih independen diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah dan melakukan perang melawan teroris. Namun perang Mali melawan terorisme cenderung bergantung pada pihak luar, khususnya PBB dan Prancis. REVAMP Prancis dan Misi Pelatihan Uni Eropa, yang telah memberikan pelatihan kepada militer Mali percaya bahwa perang melawan terorisme tidak banyak berubah. Persoalan korupsi, kolusi, dan ketidakmampuan yang menghambat kemajuan militer membuat perubahan internal di militer menjadi semakin mendasar (Boeke dan Tisseron 2014).

Mali mengambil keputusan untuk menarik diri dari pakta keamanan Prancis pada tahun 2022. Hal ini mengakibatkan terhentinya seluruh bantuan dari Prancis dan mitranya, khususnya Uni Eropa, dalam kampanye melawan terorisme di Mali. Dengan menarik pasukannya dari Operasi Barkhane, Prancis menjadi negara pertama yang melanggar perjanjian keamanan, menurut Mali (Ministère des Affaires étrangères du Mali 2022). Operasi Takuba adalah operasi baru yang menggantikan keberangkatan pasukan Prancis dari Barkhane. Namun, Operasi Takuba berakhir ketika Mali menarik diri dari pakta keamanan dengan Prancis. Prancis secara resmi mengakhiri perjuangannya selama hampir sepuluh tahun melawan terorisme di Mali pada Agustus 2022 ketika negara tersebut menyelesaikan penarikan seluruh pasukannya dari negara tersebut. Mengingat meningkatnya aktivitas organisasi teroris di Mali, hal ini tentu saja kontraproduktif (Élysée 2022).

BAB 3

KEBIJAKAN KONTRA TERORISME OLEH PRANCIS TERHADAP SERANGAN TERORISME DI KAWASAN SAHEL 2014-2022

3.1. Defensive Security

Terdiri dari istilah bahasa Inggris “defensive” dan “security”, atau “keamanan defensif”. Menurut definisinya, mengacu pada upaya untuk memberikan pembelaan dan perlindungan, atau reaksi terhadap bahaya dari luar. Dengan kata lain, tindakan defensif adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk membela diri atau pihak yang beresiko terhadap bahaya, ancaman, atau kelemahan keamanan. Menurut Paul R. Pillar, keamanan defensif dalam konteks kontraterorisme merujuk pada upaya pertahanan multi level. Langkah keamanan defensif secara spesifik memberikan perlindungan dalam bentuk pengamanan terhadap lokasi tertentu seperti, fasilitas umum, gedung dan perkantoran, kedutaan besar dan pangkalan militer yang memiliki resiko tinggi menjadi target sasaran teroris.

Menurut Pillar (2008), infrastruktur negara biasanya lebih rentan untuk menjadi sasaran kelompok teroris. Hal ini menjelaskan mengapa kelompok teroris sering menargetkan gedung-gedung negara dan pusat-pusat pemukiman padat penduduk sebagai cara untuk mengekspresikan ketidaksenangan mereka atau untuk mengkritik tindakan dan pilihan pemerintah. Selain itu, gedung-gedung negara pada dasarnya adalah hal yang penting dari sudut pandang teroris, dan akan menjadi sangat

simbolis jika diserang. Sehingga pemerintah dan otoritas negara lainnya menjadi sasaran langsung dari meningkatnya ancaman terorisme.

Ancaman kelompok militan seperti AQIM dan Boko Haram di kawasan Sahel Sahara yang sering menargetkan pangkalan militer, gedung pemerintahan dan infrastruktur vital. Untuk menghadapi ancaman ini, negara di kawasan Sahel dan Prancis menerapkan *defensive security* dan bekerja sama untuk melindungi fasilitas yang menjadi sasaran teroris. Pada tahap awal Operasi Barkhane yang dimulai Agustus 2014, Prancis mengimplementasikan melindungi pasukan dan infrastruktur militer mereka di wilayah Sahel. Upaya ini mencerminkan pengalaman Prancis dalam menghadapi ancaman gerilya dan terorisme di lapangan, yang dapat mengganggu efektivitas operasional. Salah satu aspek utama adalah pengamanan dan penguatan pangkalan militer utama di Sahel, seperti di Gao, Niamey, dan N'Djamena. Pangkalannya bukan hanya markas biasa, tetapi dibekali sistem pertahanan berlapis, termasuk penggunaan menara pengawas, tembok pelindung, radar, serta drone MQ-9 Reaper untuk pengawasan udara terus-menerus. Hal ini memastikan deteksi dini terhadap potensi serangan dari kelompok seperti AQIM dan ISGS (Martin 2020).

Selain itu, Prancis mendirikan sejumlah forward operating bases di lokasi terpencil (*plateformes désert-relais*) seperti di Menaka, Gossi, dan Tessalit, yang difungsikan sebagai pos pengintaian dan respons cepat. Setiap pos ini dilengkapi kendaraan lapis baja, helikopter Tigre, serta patroli rutin untuk memperluas radius pengamanan dan menjamin mobilitas pasukan dalam situasi darurat. Prancis juga mendukung bantuan udara jarak dekat. Prancis mengerahkan pasukan infanteri ringan yang terdiri dari 5 kompi dan 1 kompi mobil senapan mesin. Pasukan Prancis dengan

jumlah yang terbatas memanfaatkan dengan mobilitas yang tinggi, beberapa armada udara diantaranya pesawat angkut, dan satu skuadron (sub unit dalam angkatan bersenjata) yang terdiri dari 6 hingga 9 pesawat serang darat AD-4 Skyraider. Pesawat serang turboprop Super Tucano saat ini bersama dengan meningkatnya jumlah pesawat serang, pengintaian, dan transportasi serta helikopter di armada Sahel (Mi-17, Mi-24, Tétrás, dll.) mampu melakukan tugas-tugas penting seperti transportasi, pengintaian, dan dukungan tembakan. Pesawat angkut, baik sayap tetap atau sayap putar, juga sangat meningkatkan kemampuan evakuasi medis, yang sangat membantu dalam memperkuat moral pasukan (Shurkin 2022).

Namnun, pangkalan militer di wilayah Sahel seringkali menghadapi ancaman serius dari kelompok teroris, termasuk penyerangan dan bom bunuh diri. Seperti yang terjadi di pangkalan militer Burkina Faso pada tahun 2019, serangan militan menewaskan 7 tentara dan 80 jihadis. Dalam sebuah pernyataan, Kepala Staf Angkatan Darat melaporkan bahwa sekitar 100 teroris yang mengendarai sepeda motor ikut serta dalam serangan selama beberapa jam di kamp Arbinda, Burkina Faso. Selain itu, 35 orang yang berada di sekitar tewas dalam insiden tersebut (CNN Indonesia 2019). Untuk menghadapi ancaman terorisme yang semakin meningkat, Prancis mengumumkan bahwa mereka akan memperkuat kehadiran militer di wilayah Sahel untuk melawan para teroris. Florence Parsly, Menteri Pertahanan Prancis menyatakan bahwa sebagian bala bantuan akan ditempatkan di zona perbatasan yang menghubungkan Burkina Faso, Mali dan Niger. Pemerintah Prancis juga berencana mengerahkan 600 tentara tambahan dari operasi yang telah dilakukannya yang beranggotakan 4.500 yang tersebar di seluruh wilayah Sahel. Parsly juga

menambahkan bahwa peningkatan kehadiran militernya menunjukkan komitmen Prancis terhadap anti teroris. Prancis mengatakan bahwa langkah untuk memperkuat militernya merupakan respons terhadap meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut yang telah menyebabkan penduduk setempat merasa tidak aman (*Deutsche Welle* 2020).

Selain itu, tentara Prancis yang sedang berpatroli di Mali diserang oleh seorang pembom mobil bunuh diri. 6 tentara dan 4 warga sipil, termasuk seorang balita, terluka dalam peristiwa di negara yang dilanda perang tersebut. Sebelumnya, untuk menjaga wilayah sekitar pangkalan operasi di dekatnya, tentara Prancis sedang menjalankan misi pengintaian di dekat desa Gossi yang terletak di sebelah utara Mali yang berpatroli dengan kendaraan. Menurut pernyataan militer Prancis, “Ledakan kendaraan bunuh diri tersebut melukai enam tentara Prancis dan empat warga sipil Mali.” Menindaklanjuti serangan teror yang terjadi di pangkalan militer, pasukan Prancis mengirim 'unit siaga' termasuk helikopter tempur Tiger dan jet tempur Mirage 2000 ke daerah serangan untuk mendukung pasukan darat. (Detik 2021).

Pangkalan militer seringkali menjadi sasaran kejahatan terorisme di daerah rawan seperti Sahel, pangkalan militer yang bersifat tetap atau permanen lebih mudah berada di pengawasan musuh, rute menjadi mudah diprediksi, operasi yang dilakukan terasa transparan. Oleh karena itu, pangkalan militer canggih sekalipun yang menawarkan kompromi antara mobilitas, perlindungan dan kendali wilayah sekitarnya harus bersifat sementara antara 10-13 hari saja (Goya 2018). Para teroris juga merasa relatif mudah untuk menghentikan mobilitas pasukan pemerintah dengan menutup jalan yang biasa mereka lalui untuk berpindah dari satu pangkalan ke

pangkalan lainnya atau meninggalkan pangkalan untuk melakukan operasi. Tentara Sahel menderita kerugian besar setelah markas mereka dikuasai. Tanggul, parit, pagar, dan fitur pangkalan sederhana lainnya dapat meningkatkan perlindungan dengan sedikit biaya selain tenaga kerja dan taktik pengetahuan (Shurkin 2022).

3.2. Offensive Counterterrorist Operation

Pada elemen kedua yang dikemukakan oleh Paul R. Pillar dalam konsep kontra terorisme yaitu *Offensive Counterterrorist Operation*. Menurut KBBI ofensif sebagai penyerangan dan penanggulangan terorisme, yang melibatkan berbagai alat untuk menjaga keamanan melalui berbagai cara. Keadaan dan situasi suatu negara juga menentukan cara yang digunakan. Tujuan dari serangan ini adalah untuk melemahkan kemampuan teroris. Pillar menjelaskan bahwa seiring dengan semakin berkembangnya dunia kontemporer, diplomasi telah muncul sebagai instrumen penting untuk menjaga kolaborasi dalam memerangi terorisme. Pillar menggambarkan bagaimana upaya diplomatik dapat digunakan untuk melakukan serangan kontra terorisme. Kemudian, dapat bekerja sama untuk menggalang berbagai bentuk bantuan dan menggabungkan kekuatan termasuk kekuatan militer, badan intelijen dan *financial control*. Selain itu, dapat bertukar informasi sensitif tentang data internal teroris, termasuk infrastruktur, basis persembunyian, dan informasi organisasi yang dapat digunakan sebagai target balasan untuk menggagalkan dan menghentikan semua agenda radikal. Kerja sama antar negara mempermudah upaya memerangi terorisme jaringan internasional dan negara-negara yang mensponsori terorisme, dan kejahatan transnasional, yang telah menjadi ciri

terorisme kontemporer, mengubah diplomasi menjadi senjata yang mematikan. Untuk memberantas terorisme, diplomasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan (Pillar 2008, 382).

3.2.1. Penggunaan Diplomasi Kontra Terorisme

Negara-negara di kawasan Sahel melakukan sejumlah upaya ofensif, salah satunya dengan menjalin diplomasi kontra teroris dengan membangun kemitraan dengan negara lain seperti Prancis dan negara uni eropa yang menjadi sekutu Prancis dalam mendukung mempersempit jaringan teroris di kawasan Sahel. Ancaman teroris secara intrinsik terkait dengan tantangan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kelembagaan yang menghadap wilayah Sahel. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kerja sama dalam memfasilitasi menuju negara yang aman dan rekonstruksi berkelanjutan dengan landasan yang kuat. Dengan menggunakan pendekatan “3D” yang dikembangkan bersama oleh para pemangku kepentingan yaitu *defence, diplomacy, dan development stakeholders* (Ambassade de France à Singapour 2021)

Dalam memobilisasi keamanan di wilayah Sahel, Prancis hadir dengan jaringan diplomatik di Burkina Faso, Chad, Mali, Niger dan Mauritania, serta di organisasi internasional. Melalui jaringan ini, Prancis dan Sahel melakukan advokasi kepada mitranya seperti Uni Eropa dan PBB untuk mendapatkan bantuan material dan kemanusiaan di wilayah tersebut. Pada tahun 2017, konferensi pendanaan Pasukan G5 Sahel memobilisasi pemangku kepentingan internasional utama di Sahel. Konferensi ini diadakan di La Celle Saint-Cloud, Prancis pada 13 Desember 2017.

Konferensi ini dihadiri oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Italia Paolo Gentiloni, dan Presiden Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat. Konferensi ini bertujuan untuk menggalang dana untuk mendukung operasi pasukan gabungan G5 Sahel dalam memerangi terorisme dan ekstrimisme, serta melawan kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia dan narkoba. Konferensi tersebut menghasilkan Arab Saudi yang menyumbang 100 juta dolar dan Uni Emirat Arab yang setuju menyumbang 30 juta dolar. G5 Sahel tidak menerima dana PBB karena keengganan pemerintahan Trump untuk menyalurkan dana melalui PBB, namun pemerintah tetap menjanjikan \$60 juta. Konferensi donor dijadwalkan pada bulan Februari (Campbell 2017).

Gambar 1: Konferensi yang diadakan di La Celle Saint-Cloud, Prancis.



Sumber: John Campbell (2017)

Konferensi selanjutnya dilakukan di Brussels, Belgia pada 23 Februari 2018. Untuk pertama kalinya, 32 pemimpin dari seluruh dunia berkumpul di Brussels untuk mendukung negara-negara G5 Sahel yaitu Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania dan

Niger. Lebih dari 60 delegasi, termasuk negara-negara Uni Eropa, Uni Afrika, PBB dan mitra lainnya seperti Jepang atau Kanada, ambil bagian dalam konferensi tersebut, yang diadakan di Berlaymont pada hari Jumat. Konferensi ini bertujuan menggalang dana untuk operasionalisasi di Sahel dan meningkatkan koordinasi internasional dalam mendukung keamanan dan pembangunan di Sahel (*European Union* 2018). PBB telah mendorong kontribusi internasional terhadap anggaran awal Pasukan Gabungan G5 Sahel sebesar \$523 juta, namun mengatakan bahwa tanggung jawab pendanaan pada akhirnya berada di tangan negara-negara anggota G5. Masing-masing negara telah menjanjikan \$10 juta, sementara UE meningkatkan janjinya dari \$61 juta menjadi \$143 juta (€116 juta). Perancis dan Jerman menyumbangkan total dana sebesar \$21,7 juta dan meluncurkan upaya mobilisasi untuk memenuhi sisa kebutuhan keuangan G5 melalui kontribusi bilateral. Upaya ini telah menggalang kontribusi dari Spanyol, Belanda, Norwegia, Jepang, Denmark, Belgia, Luksemburg, Republik Ceko, dan Slovenia, dengan komitmen lebih lanjut yang diharapkan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masing-masing telah menjanjikan \$100 juta dan \$30 juta, dengan tambahan \$60 juta berasal dari Amerika Serikat. Selain itu, Perancis juga telah menjanjikan bantuan pembangunan sebesar \$1,5 miliar (€1,2 miliar) selama lima tahun ke depan dan UE akan menginvestasikan \$9,8 miliar (€8 miliar) dalam bantuan pembangunan kepada Sahel selama lima tahun ke depan (Nickels et al. 2018).

Selain menggalang dana, Prancis juga terlibat dalam perundingan multilateral untuk menghindari radikalisme dan menjaga komunikasi tingkat tinggi dengan mitranya. Salah satu tujuan utama upaya kontra terorisme adalah mencegah

penggunaan internet untuk kegiatan teroris. Untuk mencapai penghapusan konten teroris online secara cepat dan permanen, Prancis mengadakan diskusi tingkat tinggi dengan perusahaan digital. Melawan pejuang teroris asing, juga dikenal sebagai *Foreign Terrorist Fighters* (FTF), Perancis aktif dalam berbagai inisiatif untuk memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh FTF, baik dalam *Global Counterterrorism Forum* (GCTF) yang menyatukan 29 negara dan Uni Eropa, dan dalam organisasi internasional terkait, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena organisasi teroris memerlukan pendanaan dan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, termasuk teknologi mutakhir untuk pengumpulan dan transfer uang, Prancis memimpin upaya melawan pendanaan teroris. Oleh karena itu, Perancis mengorganisir negara-negara pada tahun 2018 yang berkomitmen untuk mencari dan menghapus semua sumber pendanaan untuk terorisme (*France Diplomacy 2023*).

Dalam upaya menghentikan pendanaan Al-Qaeda, Presiden Macron menyerukan Konferensi Internasional yaitu *No Money For Terror* yang diselenggarakan di Paris dari tanggal 25 hingga 26 April 2018. Konferensi *No Money For Terror* dihadiri oleh perwakilan dari 70 negara serta para pemimpin dari sekitar 20 organisasi regional dan internasional serta badan-badan khusus. Para peserta berjanji untuk meningkatkan kolaborasi intelijen dan kerangka hukum mereka. Agenda Paris memprioritaskan hal yang jelas dan langkah-langkah secara nyata yang diinterpretasikan dalam dokumen. Australia menjadi tuan rumah konferensi *No Money for Terror* yang kedua pada tanggal 7 dan 8 November 2019. Untuk melaksanakan Agenda Paris, Prancis melakukan upaya signifikan untuk menggalang dukungan komunitas internasional. Untuk pertama kalinya, Agenda Paris yang

disetujui Dewan Keamanan pada 28 Maret 2019 yang memuat keputusan politik yang signifikan mengenai hal ini, khususnya untuk menegaskan kembali komitmen negara, seperti menjadikan pendanaan teroris, organisasi teroris, dan aktivitas teroris sebagai tindakan ilegal (*France Diplomacy* 2023).

Gambar 2: Konferensi Internasional *No Money For Terror* di Paris.



Sumber: France Diplomacy.

Selain menghentikan dana kepada teroris, Prancis dan Jerman melakukan inisiatif bersama pada KTT G7 di Biarritz pada Agustus 2019. *The Partnership for Security and Stability in the Sahel* (P3S) merupakan inisiatif yang berfokus pada penguatan keamanan dan stabilitas di kawasan Sahel, khususnya di negara-negara G5 Sahel yaitu Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger. P3S bertujuan mendukung upaya penempatan kembali layanan pemerintah dan administrasi, khususnya pasukan keamanan dalam negeri, serta memperkuat sistem peradilan pidana di negara-negara Sahel. Selain itu, P3S juga berfokus pada peningkatan koordinasi antara mitra utama di wilayah tersebut. Program ini menargetkan negara-negara G5 Sahel serta inisiatif lintas batas yang sudah ada seperti pasukan

gabungan G5 Sahel (*Mission Permanente de la France Auprès des Nations Unies à New York* 2021). Bekerja sama dengan P3S, Prancis membentuk kemitraan Dinard pada tahun 2019 yang bertujuan untuk memerangi perdagangan manusia, perdagangan gelap obat-obatan terlarang, senjata kecil dan senjata ringan (SALW), dan penyelundupan migran, terutama karena kegiatan kriminal ini memicu ketidakstabilan dan korupsi, membahayakan supremasi hukum dan upaya perdamaian, menciptakan tempat berkembang biak bagi organisasi teroris, dan berkontribusi pada memburuknya situasi kemanusiaan (*Government of Canada* 2019).

Krisis yang berasal dari permasalahan struktural tidak dapat diatasi hanya dengan respon keamanan saja. Dalam komitmen dalam pembangunan di wilayah Sahel, Prancis merespon dengan pendekatan pembangunan melalui peningkatan pendanaan dari Prancis yaitu *Agence Française de Développement* (AFD, Badan Pembangunan Prancis) dan lembaga-lembaga Perancis lainnya mendukung proyek-proyek jangka pendek, menengah dan panjang untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti air, energi, pendidikan dan kesehatan serta mendukung otonomi masyarakat melalui pelatihan dan lapangan kerja. Di Kerangka Aliansi Sahel, Perancis bekerja sama dengan donor pembangunan besar lainnya. Kemitraan ini diluncurkan oleh Perancis, Jerman dan UE, dengan dukungan dari *African Development Bank* (AFDB), Bank Dunia dan Program Pembangunan PBB, yang saat ini membentuk sebuah platform dengan 25 anggota. Aliansi Sahel menyatukan para donor utama yang aktif di kawasan ini dengan tujuan ganda, yaitu meningkatkan koordinasi dan efektivitas bantuan dalam suatu pendekatan yang menggabungkan

penanganan keadaan darurat, stabilisasi, dan pembangunan. Pada tanggal 31 Desember 2019, Anggota aliansi mendanai 873 proyek, dimana 763 di antaranya sudah dilaksanakan, dengan total €17 miliar, dengan tambahan €12,9 miliar yang akan datang. Pada tahun 2019 saja, €3 miliar telah dicairkan di negara-negara G5 Sahel. Dalam tiga tahun sejak pembentukannya, Aliansi telah membuahkan hasil yang nyata. Contoh utamanya adalah dukungan yang diberikan kepada setengah juta petani dan penggembala, 5,6 juta orang yang kini memiliki akses terhadap air bersih, atau tiga juta anak yang menerima vaksinasi (*Ambassade de France à Singapour* 2021).

Krisis kemanusiaan dan keamanan yang serius di Sahel, urgensi dan besarnya kebutuhan memerlukan tindakan yang lebih kuat dan inklusif. Maka dibentuk koalisi Sahel yang bertujuan untuk mempertemukan bersama dengan G5 Sahel, semua negara, organisasi dan lembaga internasional yang mendukung keamanan, stabilitas dan pembangunan di Sahel. Koalisi Sahel diumumkan pada KTT Pau pada 13 Januari 2020 oleh Kepala Negara Perancis, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania dan Niger, di hadapan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Dewan Eropa, Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Ketua Komisi Uni Afrika dan Sekretaris Jenderal La Francophonie. Sebuah langkah maju baru diambil pada KTT Sahel UE G5 pada tanggal 28 April 2020, di mana para anggota Dewan Eropa sepakat untuk melanjutkan upaya bersama untuk memperluas Koalisi Sahel ke mitra internasional lainnya. Koalisi Sahel mempromosikan pendekatan regional yang komprehensif, termasuk semua pengungkit dan aktor yang terlibat di Sahel, baik itu aktor keamanan, politik, atau pembangunan. Dalam situasi keamanan dan kemanusiaan yang penuh

tantangan, inisiatif ini menawarkan kerangka kerja baru untuk tindakan internasional, yang mencakup empat pilar yang saling melengkapi, yang masing-masing diarahkan secara independen. Pilar yang pertama yaitu melawan terorisme, pilar kedua membangun kapasitas angkatan bersenjata di kawasan, pilar ketiga mendukung kembalinya negara dan pemerintahan di wilayah tersebut, memastikan akses terhadap layanan sosial dasar dan pilar yang keempat mempercepat bantuan pembangunan resmi (*Mission Permanente de la France Auprès des Nations Unies à New York* 2021).

3.2.2. Penggunaan Intelijen dan Kerja Sama Militer

DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) merupakan badan intelijen eksternal Prancis yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen di luar negeri untuk mendukung keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Prancis. Badan ini beroperasi di bawah Kementerian Angkatan Bersenjata dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen, melakukan operasi paramiliter dan kontra intelijen di luar negeri, dan terlibat dalam spionase ekonomi. DGSE berkantor pusat di Paris dan memiliki sejarah yang bermula sejak era pra-Perang Dunia II. DGSE sangat aktif dalam operasi intelijen di Afrika, khususnya di wilayah Sahel, di mana Prancis menjalankan operasi militer seperti Barkhane untuk melawan kelompok militan dan teroris (DGSE, n.d.).

DGSE berperan penting dalam operasi yang mengarah pada kematian Abdelmalek Droukdel, pimpinan AQIM, pada 3 Juni 2020 di Mali utara. DGSE bersama pasukan khusus Prancis melakukan pengumpulan intelijen yang intensif dan

bertukar informasi untuk melacak keberadaan Droukdel di wilayah pegunungan Mali yang berbatasan dengan Aljazair, yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya. Operasi tersebut juga mendapat dukungan intelijen dan pemantauan dari *United States Africa Command* (AFRICOM), yang membantu dalam penargetan sasaran secara tepat. Informasi intelijen yang dikumpulkan DGSE memungkinkan pasukan Prancis dan mitranya melakukan serangan yang berhasil menewaskan Droukdel dan beberapa afiliasinya, sehingga menjadi kemenangan penting dalam perang melawan kelompok militan di Sahel (Roger 2021).

Selain penangkapan pemimpin AQIM, intelijen Prancis juga berperan dalam penangkapan seorang anggota senior kelompok *Islamic State in the Greater Sahara* (ISGS) yaitu Oumeya Ould Albakaye. Penangkapan tersebut terjadi ketika Prancis bersiap untuk menyelesaikan penarikan pasukannya dari Mali setelah hampir satu dekade memerangi pemberontakan di negara tersebut dengan pasukan anti pemberontakan Barkhane yang dipimpin Prancis. Operasi tersebut, yang dilakukan di dekat perbatasan dengan Niger, memerlukan persiapan berminggu-minggu yang melibatkan unit angkatan udara dan angkatan darat yang dinyatakan oleh Menteri Angkatan Bersenjata Prancis. Albakaye akan ditahan oleh pasukan Prancis untuk diinterogasi selama beberapa hari dan kemudian diserahkan kepada pihak berwenang Mali. Albakaye pernah dipandang sebagai calon penerus mantan pemimpin ISGS Adnan Abu Walid al Sahrawi, yang dibunuh oleh pasukan Prancis pada Agustus 2021. Albakaye adalah pemimpin regional dalam kelompok tersebut, memimpin wilayah Gourma di Mali dan Oudalan di negara tetangga Burkina Faso. Dia bertanggung jawab atas sejumlah besar pelanggaran terhadap warga sipil di

negara-negara tersebut. Kementerian Pertahanan Prancis menyebut penguasaan Albakaye sebagai “keberhasilan lain bagi pasukan Barkhane, yang melakukan perjuangannya melawan kelompok teroris bersenjata sambil menempatkan kembali pasukannya di luar Mali” (*Asharq Al-Awsat* 2022).

Prancis mengoperasikan pangkalan intelijen di Niamey, Niger yang dilengkapi dengan drone pengintai untuk memantau aktivitas militan di seluruh wilayah Sahel. Selain itu, dukungan dari AFRICOM dalam bentuk intelijen, pengangkutan udara, pengisian bahan bakar, dan logistik telah memperkuat operasional Prancis. Dari aktivitas tersebut, pada bulan Juni 2022 Prancis melakukan serangan drone di Niger yang menunjukkan keberhasilan dalam memanfaatkan intelijen untuk melaksanakan operasi militer presisi. Dalam serangan tersebut, Prancis berhasil menewaskan 40 orang militan bersenjata yang diduga berafiliasi dengan kelompok teror seperti ISGS. Serangan ini berada di wilayah perbatasan Niger-Burkina Faso yang merupakan salah satu kawasan rawan aktivitas teroris. Kemampuan drone pengintai membantu melacak pergerakan kelompok bersenjata di daerah yang sulit diakses dan informasi intelijen diperoleh melalui pengawasan udara di wilayah tersebut. Operasi ini dianggap sebagai salah satu keberhasilan signifikan dalam menghambat kemampuan operasional kelompok teroris di wilayah Niger (Mahsie 2021).

Selain kerja sama intelijen, Prancis juga melakukan sebuah inisiatif militer multinasional yang diluncurkan pada Maret 2020 untuk mendukung stabilitas dan keamanan di wilayah Sahel, khususnya di Mali. Dibentuk atas inisiatif Prancis, Operasi Takuba melibatkan sejumlah negara Eropa, termasuk Estonia, Swedia, Italia, Belgia, Republik Ceko, dan Belanda. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas pasukan lokal, terutama militer Mali dan Niger, dalam menghadapi ancaman kelompok teroris seperti AQIM dan ISGS. Wilayah operasional utama Takuba adalah kawasan Liptako, daerah perbatasan yang mencakup Mali, Niger, dan Burkina Faso. Wilayah ini dikenal sebagai zona merah bagi aktivitas terorisme dan kriminal lintas batas, menjadikannya prioritas dalam strategi keamanan regional (*Al Jazeera* 2020).

Takuba dioperasikan sebagai bagian dari kerangka Operasi Barkhane yang sudah berjalan lebih dahulu di wilayah tersebut. Nama “Takuba” yang berarti “pedang” dalam bahasa Tuareg, mencerminkan misi operasi ini untuk menjadi ujung tombak dalam memerangi terorisme di kawasan yang secara geografis sulit dan rawan konflik. Operasi Takuba dirancang untuk fokus pada pelatihan dan pendampingan pasukan lokal dalam melaksanakan operasi kontra terorisme. Berbeda dari operasi militer tradisional yang langsung terlibat dalam pertempuran besar, Takuba mengambil pendekatan yang lebih strategis. Pasukan khusus dari negara-negara peserta ditempatkan bersama militer lokal di garis depan untuk memberikan dukungan taktis dan operasional secara langsung. Pendampingan ini meliputi perencanaan, pengintaian, logistik hingga eksekusi operasi (Schmauder et al. 2020).

Selama beroperasi, Operasi Takuba berhasil mendukung militer lokal dalam beberapa operasi penting. Salah satu pencapaian utamanya adalah “Operation Solstice” yang menargetkan kelompok ISGS di kawasan Liptako. Operasi ini menghasilkan eliminasi sejumlah militan teroris, penyitaan peralatan mereka, dan pengamanan wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali kelompok tersebut. Namun, Operasi Takuba juga menghadapi tantangan yang signifikan. Ketegangan

politik di Mali yang dipicu oleh dua kudeta militer tahun 2020 dan 2021, memengaruhi hubungan antara pemerintah Mali dan mitra internasional, termasuk Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Akibatnya, pada awal 2022 pemerintah Mali meminta pasukan asing untuk meninggalkan wilayahnya. Hal itu menyebabkan penghentian Operasi Takuba pada Juni 2022 (*France24* 2022).

3.3. *Law Enforcement and Military Force*

Topik tentang apakah tindakan teroris merupakan “kejahatan atau perang” banyak menimbulkan perdebatan di dalamnya. Pillar menjelaskan dalam pemikirannya bahwa munculnya kontroversi “kejahatan atau perang” dalam persidangan para teroris memengaruhi langkah-langkah penanggulangan terorisme yang diambil oleh semua negara di seluruh dunia. Keuntungan dan kerugiannya telah menimbulkan diskusi di antara masyarakat, pemerintah, dan pejabat penegak hukum di sejumlah negara. Beberapa orang percaya bahwa penggunaan operasi militer untuk memerangi teroris adalah berlebihan dan dramatis, sementara yang lain memandang terorisme sebagai kejahatan yang harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, sebagian pihak meyakini bahwa pendekatan militer merupakan tindakan terbaik karena mengingat seriusnya ancaman terorisme, operasi militer harus diprioritaskan dan masalah harus diselesaikan secara tegas (Pillar 2008).

Setiap instrumen memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan seperti alat anti terorisme lainnya, gagasan terorisme memerlukan program yang terpadu dan sinergis agar dapat saling melengkapi, menghubungkan kekuatan di berbagai bidang, dan mengurangi peluang bagi teroris. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan

operasi militer atau menegakkan hukum pidana bergantung pada kebijakan negara dalam melihat kenyataan dan keadaan suatu kasus yang terjadi. Jika kejahatan tersebut telah mengancam kedaulatan negara atau teror tersebut masih layak digolongkan sebagai kejahatan, maka operasi militer merupakan tindakan yang bijaksana (Pillar 2008).

Pemerintah Sahel dan Prancis terlibat dalam dinamika kompleks dalam upaya memerangi terorisme di wilayah Sahel. Prancis menggunakan operasi militer sebagai instrumen untuk menangani ancaman terorisme yang mengancam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks operasi multinasional seperti G5 Sahel, mekanisme peradilan militer sering kali tidak efektif atau tidak ada. Hanya Operasi Barkhane yang memiliki polisi militer yang bertugas menyelidiki pelanggaran yang melibatkan personel Prancis. Namun, investigasi ini biasanya dilakukan atas instruksi atasan, dan jarang terjadi penyelidikan independen. Hal ini menunjukkan keterbatasan dalam akuntabilitas dan penegakan hukum dalam operasi militer di wilayah tersebut. Selain itu, Prancis lebih mengandalkan serangan udara dan operasi khusus untuk menetralkan ancaman secara cepat yang dianggap lebih efisien dibandingkan penangkapan yang memerlukan dukungan logistik dan proses hukum yang kompleks. Melalui keterlibatan militer, Prancis berusaha mendukung negara-negara Sahel dalam menjaga keamanan dan mencegah penyebaran terorisme ke wilayah yang lebih luas. Dari tahun 2014 sampai 2022 Prancis telah berhasil menangkap sejumlah besar militan dari berbagai kelompok teroris (Wouabeng 2020).

Pada awal dimulainya operasi barkhane tahun 2014, pasukan Prancis melakukan serangan udara di Lembah Ametettai, wilayah Kidal, Mali. Serangan tersebut menewaskan Omar Ould Hamaha, seorang komandan senior militan Islamis yang dikenal dengan julukan "Jenggot Merah" karena janggutnya yang diwarnai henna. Hamaha merupakan tokoh penting dalam kelompok AQIM dan MUJAO, serta terlibat dalam penculikan diplomat Aljazair di Gao pada 2012. Serangan ini merupakan bagian dari operasi kontra-terorisme Prancis yang lebih luas di Mali, yang diluncurkan untuk menumpas kelompok militan yang menguasai wilayah utara negara tersebut sejak 2012 (*Al Jazeera* 2014). Di tahun 2015, Prancis melakukan sejumlah operasi, salah satunya yaitu pasukan khusus Prancis berhasil menyelamatkan Sjaak Rijke, seorang warga negara Belanda yang disandera oleh kelompok terkait Al-Qaeda sejak November 2011. Presiden Prancis saat itu, François Hollande, mengatakan pasukan komando Prancis telah menemukan Rijke secara tidak sengaja. Rijke diculik dari sebuah hotel di Timbuktu di Mali utara pada bulan November 2011 saat sedang berlibur bersama istrinya. Ia telah disandera selama tiga setengah tahun (Chrisafis 2015).

Pada tahun 2016, tepatnya bulan februari pasukan khusus Prancis yang tergabung dalam Operasi Barkhane melakukan serangan yang menargetkan tokoh-tokoh penting di wilayah Mali utara. Serangan terjadi di dekat sumur Al-Zuraybah, sekitar 180 km utara Timbuktu. Dua militan AQIM tewas yaitu Abu al Nour al Andalusi seorang warga negara Spanyol dari enclave Melilla di Maroko, yang sebelumnya tampil dalam video propaganda AQIM menyerukan jihad kepada Muslim di Spanyol dan Marwan al-Masri warga negara Mesir yang tewas bersama al

Andalusi dalam serangan tersebut (Weiss 2016). Pada tahun 2017, tentara Prancis dikerahkan ke Mali untuk memerangi para ekstrimis islam yang telah menewaskan sedikitnya 20 jihadis di perbatasan negara itu dengan Burkina Faso. Sekitar 1.600 tentara Prancis dikerahkan di Mali sebagai bagian dari Operasi Barkhane yang lebih besar terhadap para ekstremis islam di wilayah Sahel. Operasi Barkhane Prancis dimulai pada hari Jumat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tentara dari hari Minggu hingga Kamis di hutan Serma, Mali yang menyebabkan 20 jihadis tumbang (Ahmed 2017).

Pada 27–28 Desember 2018, pasukan Prancis dan Niger melancarkan operasi gabungan di wilayah Tongo, Niger, dekat perbatasan Mali. Operasi ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam memerangi kelompok militan di wilayah Sahel. Operasi dimulai pada malam 27 Desember dengan serangan udara yang melibatkan jet tempur Mirage, helikopter serang, drone MQ-9 Reaper, dan pesawat pengisian bahan bakar C135. Serangan ini menargetkan posisi militan yang diduga berasal dari kelompok ISGS. Setelah serangan udara, pasukan darat Prancis dan Niger, termasuk komando gunung dan pasukan terjun payung, melakukan penyisiran selama 48 jam di area seluas 15 kilometer. Menurut pernyataan militer Prancis, sekitar 15 militan tewas dalam operasi ini. Pasukan gabungan juga berhasil menyita sekitar 20 sepeda motor, 26 senjata termasuk senapan mesin, serta sejumlah amunisi. Tidak ada korban di pihak Prancis maupun Niger (Kelly 2018). Pada malam 9 hingga 10 Mei 2019, pasukan khusus Prancis melancarkan operasi penyelamatan di Burkina Faso untuk membebaskan empat sandera yaitu dua warga Prancis, satu warga Amerika, dan satu warga Korea Selatan. Operasi ini berhasil membebaskan para sandera, namun dua

prajurit Prancis, Cédric de Pierrepont dan Alain Bertoncello gugur dalam misi tersebut. Empat penculik tewas dalam operasi ini. Operasi ini menunjukkan komitmen Prancis dalam melindungi warganya dan melawan kelompok militan di wilayah Sahel (Harding 2019).

Pada 12 November 2020, pasukan Prancis yang tergabung dalam Operasi Barkhane melancarkan serangan terhadap kamp militan di dekat kota Niaki, Mali tengah. Operasi ini menargetkan kelompok militan *Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin* (JNIM), yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Pasukan Prancis mendeteksi keberadaan kamp militan di sekitar Niaki, sekitar 180 km timur kota Mopti. Empat jet tempur Mirage 2000 lepas landas dari pangkalan udara Niamey di Niger untuk melakukan serangan udara awal. Selain itu, empat helikopter serang Tigre dan tiga helikopter transportasi Caïman membawa pasukan komando gunung (*Groupement de commandos de montagne*) ke lokasi. Setelah serangan udara, pasukan darat terlibat dalam pertempuran selama sekitar satu jam. Sekitar 30 militan tewas dalam operasi ini. Pasukan Prancis juga menyita sekitar 20 sepeda motor dan sejumlah besar senjata dari kamp tersebut (Lauras and Hauchard 2020).

Pemerintah Prancis mengumumkan bahwa militer Prancis telah membunuh Adnan Abu Walid al Sahrawi, pemimpin ISGS pada 17-22 Agustus 2021. Sebelumnya al Sahrawi bertanggung jawab atas serangan “pengecut dan sangat mematikan” yang menargetkan warga sipil dan pasukan keamanan di Niger, Mali dan Burkina Faso, menurut pernyataan dari juru bicara kepresidenan Prancis. Dalam konferensi pers, Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parsly mengumumkan bahwa al Sahrawi meninggal karena luka-lukanya, menderita

serangan sepeda motor yang membawa dua orang selama operasi udara dan darat yang dipimpin Prancis di Mali. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan cuitan pada Kamis pagi. "Ini adalah keberhasilan besar lainnya dalam perang melawan kelompok teroris di Sahel," kata Macron, tanpa menyebutkan lokasi atau rincian operasi (*France24* 2021).

Gambar 3: Cuitan Emmanuel Macron mengenai terbunuhnya al Sahrawi



Sumber: Akun Twitter resmi Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)

Pada tahun 2022, meskipun Prancis mulai mengurangi kehadiran militernya di Mali sebagai bagian dari penarikan Operasi Barkhane, mereka tetap melanjutkan operasi kontra terorisme di wilayah Sahel. Pada periode 26 hingga 31 Maret 2022, pasukan Prancis melancarkan dua operasi militer di wilayah Liptako, Mali, yang menjadi benteng kelompok militan seperti ISGS dan JNIM. Dalam operasi tersebut, sekitar 30 militan tewas, termasuk anggota dari kedua kelompok tersebut, serta sejumlah senjata berhasil disita oleh pasukan Prancis (*Al Jazeera* 2022).

Berakhirnya operasi kontra terorisme oleh Prancis di Sahel antara tahun 2014 hingga 2022 mencatat perjalanan panjang perjuangan melawan kelompok militan di wilayah yang penuh tantangan geopolitik ini. Prancis secara aktif melakukan operasi militer atau operasi khusus dalam upayanya memerangi terorisme di wilayah Sahel. Namun, setelah berakhirnya Operasi Barkhane pada akhir 2022, situasi keamanan di wilayah Sahel tidak membaik secara signifikan. Sebaliknya, aktivitas kelompok teroris seperti *Jama'at Nasr al-Islam wal-Muslimin* (JNIM) dan *Islamic State Sahel Province* (ISSP) justru meningkat, menunjukkan bahwa ancaman terorisme tetap tinggi dan belum sepenuhnya teratasi (Ahmed and McMakin 2025). Menurut Global Terrorism Index 2025, wilayah Sahel menyumbang 51% dari total kematian akibat terorisme global pada tahun 2024, dengan lebih dari 25.000 korban jiwa akibat konflik bersenjata, termasuk 4.794 kematian terkait terorisme (Jnr 2025). Selain itu, ketidakstabilan politik yang ditandai dengan kudeta militer di Mali, Burkina Faso, dan Niger telah memperburuk situasi keamanan. Ketiga negara tersebut membentuk aliansi baru, *Alliance of Sahel States* (AES), dan mengakhiri kerja sama dengan Prancis serta ECOWAS (Vo 2025).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Wilayah Sahel merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap aktivitas terorisme. Kondisi geografis yang luas yang berada di gurun sahara memberikan ruang gerak yang besar bagi kelompok teroris seperti AQIM, ISIS, JNIM beroperasi secara bebas. Ketidakstabilan politik yang dialami beberapa negara di Sahel, termasuk munculnya kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Mali di tahun 2012 yang memperparah situasi keamanan di wilayah tersebut. Pemerintah yang kurang mampu mengendalikan wilayah dan memberikan perlindungan kepada warganya membuka peluang bagi kelompok teroris untuk memperluas pengaruh dan menjalankan aktivitas mereka tanpa hambatan berarti. Atas perintah pemerintah Mali di tahun 2013, Prancis menjalankan operasi serval guna memerangi terorisme di wilayah Mali dan juga negara Sahel. Keberhasilan operasi serval membuat Prancis melakukan operasi yang lebih luas yang diberi nama Operasi Barkhane sebagai upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk melawan terorisme di wilayah Sahel.

Lemahnya kontrol pemerintah setempat, ketidakstabilan politik dan krisis kemanusiaan memperburuk situasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung perekrutan anggota baru oleh kelompok teroris. Selain itu, wilayah Sahel juga menjadi jalur utama perdagangan gelap, termasuk penyelundupan senjata, narkoba,

dan manusia, yang menjadi sumber pendanaan bagi aktivitas teroris. Menanggapi ancaman ini, Prancis melakukan upaya untuk mengatasi serangan terorisme maupun ancaman dengan Operasi Barkhane, upaya tersebut juga dianalisis menggunakan teori kontra terorisme oleh Paul R. Pillar yang terbagi menjadi 3 elemen. Yang *pertama*, Prancis melakukan upaya *Defensive Security* dengan melindungi pangkalan militer yang seringkali menjadi sasaran teroris, dan membuat pangkalan militer berpindah-pindah agar tidak mudah diprediksi. Selain itu, Prancis mengerahkan pasukan udara jarak dekat, yang mengerahkan pasukan infanteri ringan dan satu skuadron. Pesawat angkut juga membantu melakukan tugas-tugas penting seperti transportasi, pengintaian, dan dukungan tembakan.

Upaya yang *kedua* yaitu *Offensive Counterterrorist Operation*, Prancis melakukan diplomasi kontra terorisme seperti pada tahun 2017, konferensi yang diadakan untuk pendanaan untuk mendukung operasi pasukan gabungan G5 Sahel dalam memerangi terorisme dan ekstrimisme, serta melawan kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia dan narkoba. Setelah itu, konferensi diadakan kembali pada 23 Februari 2018 yang dihadiri 60 delegasi untuk menggalang dana operasionalisasi di Sahel dan meningkatkan koordinasi internasional dalam mendukung keamanan dan pembangunan di Sahel. Penggunaan intelijen juga berperan penting dalam penangkapan terorisme, seperti operasi kematiannya Abdelmalek Droukdel yang merupakan pemimpin AQIM dan penangkapan anggota senior ISGS yaitu Oumeya Ould Albakaye.

Prancis melakukan upaya yang *ketiga* yakni *Law Enforcement and Military Force*, operasi militer dilakukan dari 2014-2022 menggunakan Operasi Barkhane.

Penulis merangkum satu kejadian operasi militer yang terjadi dari awal mulai operasi barkhane yaitu 2014 sampai akhir dari operasi yaitu pada tahun 2022. Salah satunya yaitu saat terbunuhnya Adnan Abu Walid al Sahrawi yang merupakan pemimpin *Islamic State in the Greater Sahara* (ISGS) oleh pasukan Prancis hingga Presiden Emmanuel Macron mengunggah cuitan tentang kematian al Sahrawi. Namun, operasi kontra terorisme oleh Prancis di wilayah Sahel tidak membaik secara signifikan. Aktivitas terorisme tetap tinggi dan belum sepenuhnya teratasi. Selain itu, ketidakstabilan politik di sejumlah negara seperti Burkina Faso, Mali dan Niger telah memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut.

4.2. Rekomendasi

Pada penelitian ini, penulis meneliti tentang Operasi Barkhane Sebagai Kebijakan Kontra Terorisme oleh Prancis 2014-2022. Berdasarkan penjelasan dan uraian yang tersedia dalam penulisan di atas, penulis memberikan rekomendasi yang dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang terorisme di wilayah Sahel. Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan untuk penelitian selanjutnya yaitu meneliti konsekuensi dari berakhirnya Operasi Barkhane pada tahun 2022 dan penarikan pasukan Prancis dari wilayah Sahel. Analisis bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika keamanan regional, kemampuan negara-negara Sahel untuk memerangi terorisme, dan peran aktor eksternal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Camara, Alassane. 2020. "The G5 Sahel: Security Implementation and Challenges."

Open Journal of Political Science 3 (July). 10.4236/ojps.2020.103030.

Cooke, Jennifer G., Boris Toucas, and Katrin Heger. 2017. "Understanding the G5 Sahel Joint Force: Fighting Terror, Building Regional Security?" Center For Strategic & International Studies (CSIS).

<https://www.csis.org/analysis/understanding-g5-sahel-joint-force-fighting-terror-building-regional-security>.

Doukhan, David. 2022. "The End of Operation Barkhane." *The International Institute for Counter-Terrorism*, 1-7.

Doxsee, Catrina, Jared Thompson, and Marielle Harris. 2022. "The End of Operation Barkhane and the Future of Counterterrorism in Mali." *Center for Strategis & International Studies*, (Maret).

[https://www.csis.org/analysis/end-operation-barkhane-and-future-counterterrorism-mali?](https://www.csis.org/analysis/end-operation-barkhane-and-future-counterterrorism-mali)

Economist Intelligence Unit N.A. Incorporated. 2020. "Africa and France: reshaping ties and renewing engagement." *The Economist Intelligence Unit Limited*.

Franco, Ana C. 2021. "External Interventions in Mali and its Borderlands – A Case for Stabilitation." *JANUS.NET, e-journal of International Relations* 12:75-88.

<https://doi.org/10.26619/1647-7251.12.2.6>.

- Goya, Lurent T. 2018. *Une révolution militaire africaine: Lutter contre les organisations armées en Afrique subsaharienne (French Edition)*. Une révolution militaire africaine: Lutter contre les organisations armées en Afrique subsaharienne.
- Griffin, Christopher. 2016. "Operation Barkhane and Boko Haram: French Counterterrorism and Military Cooperation in the Sahel." *Small Wars & Insurgencies*, 896-913. <https://doi.org/10.1080/09592318.2016.1208283>.
- Hunt, Charles T., and Shannon Zimmerman. 2022. "Counter-Terrorism & Peace Operations: The Impacts of UN Security Council Approaches to Tackling Terror on the Pursuit of Peace." *RESOLVE Network*.
<https://doi.org/10.37805/sfi2022.2>.
- King, Isabelle. 2023. "How France Failed Mali: the End of Operation Barkhane." *Harvard International Review*, January 30, 2023.
<https://hir.harvard.edu/how-france-failed-mali-the-end-of-operation-barkhane/>
- Lauras, Didier, and Amaury Hauchard. 2020. "French forces kill Jihadist commander in Mali." *International Business Times UK*, November 14, 2020.
<https://www.ibtimes.co.uk/french-forces-kill-jihadist-commander-mali-1685947?>
- Lebovich, Andrew. 2021. "Mapping Armed Groups in Mali and the Sahel." *European Council on Foreign Relations*.

- Medessoukou, Sylvain. 2018. "The Foreign Security Policy in Africa: France in Sahel Region." *American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS)* 47:156-165.
- Muvunyi, Fred. 2020. "Chad: 60 years of independence – DW – 08/10/2020." *DW*, August 10, 2020.
<https://www.dw.com/en/how-free-is-chad-60-years-after-independence/a-54486432>.
- Nickels, Benjamin, Jean-Baptiste Matton, and Alix Boucher. 2018. "The G5 Sahel Joint Force Gains Traction." *Africa Center For Strategic Studies*.
<https://africacenter.org/spotlight/g5-sahel-joint-force-gains-traction/>
- Pujari, Sudarshan. 2020. "French Intervention in West Africa: Interests and Strategies (2013–2020)." *E-International Relations*.
- Rich, David. 2022. "Pourquoi l'opération Barkhane n'a pas réussi à endiguer l'insécurité au Sahel." *France24*, 2022.
- Roger, Benjamin. 2021. "Côte d'Ivoire – Benin: French intelligence warn of jihadist expansion." *the Africa report*, Februari 8, 2021.
<https://www.theafricareport.com/63807/cote-divoire-benin-why-french-intelligence-released-footage-of-a-jihadist-meeting/>.
- Sholehudin, Miftahus. 2015. "ISIS, Pemberontak, dan Teroris Dalam Hukum Internasional." "*El-Qudwah*" *LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* 1:1-17.
<http://repository.uin-malang.ac.id/288/1/Artikel%20ISIS%20pemberontak.pdf>

- Shurkin, Michael. 2022. "Strengthening Sahelian Counterinsurgency Strategy."
Africa Center for Strategic Studies, (July).
<https://africacenter.org/publication/strengthening-sahelian-counterinsurgency-strategy>.
- Spet, Lt Col S. 2015. "Operation Serval Analyzing the French Strategy against Jihadists in Mali." *ASPJ Africa & Francophonie*, 66-79.
- Weiss, Caleb. 2016. "French special forces target al Qaeda commanders in Mali."
Long War Journal, (Maret).
- Wing, Susanna D. 2016. "French intervention in Mali: strategic alliances, long-term regional presence?" *Small Wars & Insurgencies*, 59-80.
<https://doi.org/10.1080/09592318.2016.1123433>.
- Wouabeng, Corine. 2020. "'Judicialisation' of Military Operations Scenarios: A Pillar of Success of Counterterrorism in the Sahel Region." *African Journal of Terrorism and Insurgency Research (AJoTIR)*.
<https://doi.org/10.31920/2732-5008/2020/V1N3A3>.

Buku

- Pillar, Paul R. 2008. "Counterterrorism." In *Security Studies an Introduction*. New York, USA: Routledge Taylor & Francis Group.
- Segell, G., Kostelyanets, S., & Solomon, H. (Eds.). (2021). *Terrorism in Africa: New Trends and Frontiers*. Institute for African studies of the Russian academy of sciences.

Shurkin, Michael, Stephanie Pezard, and S. R. Zimmerman. 2017. *Mali's Next Battle: Improving Counterterrorism Capabilities*. N.p.: RAND Corporation.

Laporan

International Rescue Committee. 2023. "Burkina Faso: Coups and conflict drive crisis."

<https://www.rescue.org/article/burkina-faso-coups-and-conflict-drive-crisis>.

Ministry of Defence UK. 2016. "Defence Secretary secures progress on Brimstone sales as unmanned aircraft project moves forward." 2016.

<https://www.gov.uk/government/news/defence-secretary-secures-progress-on-brimstone-sales-as-unmanned-aircraft-project-moves-forward>.

United Nations. 2017. "Résolution 2359."

https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/resolution_2359_2017_fr.pdf

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). 2021.

"Sahel Crisis: Humanitarian Needs and Requirements Overview."

Vision Of Humanity. n.d. "Key findings from the Global Terrorism Index 2024

report." <https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/>.

Artikel Daring

Africa News. n.d. "Burkina Faso ranked 2nd in Global Terrorism Impact."

Africa Union Commission. 2017. "Roundtable on Regional Coalitions and Implications for the APSA and the ASF."

Ahmed, Baba. 2017. "French soldiers kill 20 jihadis in Mali near Burkina Faso." *AP News*, Juni 3, 2017. <https://apnews.com/general-news->

Al Jazeera. 2014. "French strike 'kills Mali rebel commander.'" Maret 14, 2014. <https://www.aljazeera.com/news/2014/3/14/french-strike-kills-mali-rebel-commander>.

Al Jazeera. 2020. "France and allies establish new task force in Sahel." Maret 28, 2020. [https://www.aljazeera.com/news/2020/3/28/france-and-allies-establish-new-task-force-in-sahel?](https://www.aljazeera.com/news/2020/3/28/france-and-allies-establish-new-task-force-in-sahel)

Al Jazeera. 2022. "French soldiers kill more than 30 fighters in Mali operations." 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2020/2/7/french-soldiers-kill-more-than-30-fighters-in-mali-operations>.

Ambassade de France à Singapour. 2021. "France's action in the Sahel." 2021. <https://sg.ambafrance.org/France-s-action-in-the-Sahel?>

Asharq Al-Awsat. 2022. "France Claims Capture of Senior ISIS Figure in Mali." Juni 16, 2022. <https://english.aawsat.com/home/article/3706456/france-claims-capture-senior-isis-figure-mali>.

BBC. 2020. "Sommet de Pau : bientôt une "Coalition pour le Sahel." January 14, 2020. <https://www.bbc.com/afrique/region-51102086>.

BBC. 2020. "Al-Qaeda chief in north Africa Abdelmalek Droukdel killed - France." June 5, 2020. <https://www.bbc.com/news/world-africa-52943692>.

- Campbell, John. 2017. "G5 Sahel: An African (and French) Solution to an African Problem." *Council on Foreign Relations*, Desember 29, 2017.
- Chrisafis, Angelique. 2015. "French special forces rescue hostage held in Mali since 2011." *The Guardian*, 2015.
<https://www.theguardian.com/world/2015/apr/06/french-special-forces-rescue-hostage-mali?>
- CNN Indonesia*. 2019. "Serangan di Burkina Faso, 7 Tentara dan 80 Militan Tewas." 2019.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191225031559-127-459752/serangan-di-burkina-faso-7-tentara-dan-80-militan-tewas>.
- Coalition Sahel. n.d. "« Providing a More Collective and Inclusive Response to the Sahel Crisis and its Vicinity »." <https://www.coalition-sahel.org>.
- Detik*. 2021. "Ledakan Bom Mobil Bunuh Diri di Mali, 6 Tentara Prancis-4 Warga Terluka." 2021.
<https://news.detik.com/internasional/d-5615090/ledakan-bom-mobil-bunuh-diri-di-mali-6-tentara-prancis-4-warga-terluka>.
- Deutsche Welle*. 2020. "France to boost troops in Africa's Sahel." 2020.
<https://www.dw.com/en/france-to-boost-military-troops-in-africas-sahel-to-counter-terrorism/a-52232235>.
- DGSE. n.d. "Accueil (EN)." DGSE. Accessed May 5, 2025.
<http://www.dgse.gouv.fr/en>.
- Economist Intelligence Unit N.A. Incorporated. 2020. "Africa and France: reshaping ties and renewing engagement." *The Economist Intelligence Unit Limited*.

Élysée. 2022. “Retrait de la force Barkhane du Mali.” 2022.

<https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/08/15/retrait-de-la-force-barkhane-du-mali>.

European Union. 2018. “International High level conference on the Sahel: €414 million raised to increase security in the Sahel, EU doubles support for G5 Joint Force.” Februari 23, 2018.

https://trust-fund-for-africa.europa.eu/news/international-high-level-conference-sahel-eu414-million-raised-increase-security-sahel-eu-doubles-2018-02-23_en?

France24. 2021. “French troops kill leader of Islamic State group in Sahel, Macron says.” September 16, 2021.

<https://www.france24.com/en/africa/20210915-french-troops-neutralise-leader-of-islamic-state-in-the-greater-sahara-macron-says?>

France24. 2022. “EU's Takuba force quits junta-controlled Mali.” Juli 1, 2022.

<https://www.france24.com/en/africa/20220701-eu-s-takuba-force-quits-junta-controlled-mali?>

France Diplomacy. 2023. “Terrorism: France's International Action - Ministry for Europe and Foreign Affairs.” 2023.

<https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/terrorism-france-s-international-action>.

Government of Canada. 2019. “Dinard declaration on the partnership for a comprehensive and sustainable strategy to combat illicit trafficking in the Sahel region.” 2019.

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/g7/documents/2019-04-06-sahel.aspx?

Harding, Luke. 2019. "Two French soldiers killed rescuing hostages in west Africa."

The Guardian, Mei 10, 2019.

<https://www.theguardian.com/world/2019/may/10/two-french-soldiers-killed-rescuing-hostages-in-west-africa?>

iRiS. 2020. "Le Sommet de Pau et l'approbation de l'opération Barkhane vus depuis le Mali." <https://www.iris-france.org>.

<https://www.iris-france.org/143812-le-sommet-de-pau-et-lapprobation-de-loperation-barkhane-vus-depuis-le-mali/>.

Kelly, Fergus. 2018. "Joint France-Niger air and ground operation near Tongo Tongo kills 15 'terrorists.'" *The Defense Post*, Desember 30, 2018.

<https://thedefensepost.com/2018/12/30/niger-france-air-ground-operation-tongo-tongo-kills-15-terrorists/?>

Larivé, Maxime H. 2014. "Welcome to France's New War on Terror in Africa: Operation Barkhane." *The National Interest*, 1-15.

Mahsie, Abraham. 2021. "France Stresses Need for Continued American ISR in African Sahel." *Air & Space Forces*, Juli 9, 2021.

<https://www.airandspaceforces.com/france-stresses-need-for-continued-american-isr-in-african-sahel/>?

Martin, Guy. 2020. "Determination in the desert." *defenceWeb*, November 2, 2020.

<https://www.defenceweb.co.za/joint/diplomacy-a-peace/determination-in-the-desert/?>

MINUSMA. n.d. “MINUSMA - United Nations Stabilization Mission in Mali.”

<https://minusma.unmissions.org/en/history>.

Mission Permanente de la France Auprès des Nations Unies à New York. 2021. “The Coalition for the Sahel: a collective and inclusive response.” 2021.

<https://onu.delegfrance.org/the-coalition-for-the-sahel-a-collective-and-inclusive-response>.

Pascal, Philippe. 2020. “G5 Sahel : conférence de presse des Chefs d'État à l'issue du Sommet de Pau.” *Elysee.fr*, January 13, 2020.

<https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/01/13/sommet-de-pau-declaration-conjointe-des-chefs-detat>.

Perre, Christophe V., and Benoit Tessier. 2019. “French troops in Mali anti-jihadist campaign mired in mud and mistrust.” *Reuters*, 2019.

Sahel Alliance. n.d. “The Sahel Alliance.” <https://www.alliance-sahel.org/en/sahel-alliance/>.

Schmauder, Anna, Zoë Gorman, and Flore Berger. 2020. “TAKUBA: A NEW COALITION FOR THE SAHEL?” *Clingendael Spectator Magazine for International Relations*, Juni 30, 2020.

<https://spectator.clingendael.org/en/publication/takuba-new-coalition-sahel?>

Schofield, Hugh. 2022. “France calls time on anti-jihadist Operation Barkhane in Sahel.” *BBC*, November 9, 2022.

<https://www.bbc.com/news/world-europe-635756>

Suleiman, Muhammad D. 2017. “Sahel region, Africa.” *The Conversation*, February 27, 2017. <https://theconversation.com/sahel-region-africa-72569>.

VOA Indonesia. 2017. "Pasukan Militer Bersama G5 Sahel akan Tangani Terorisme."

November 04, 2017.

<https://www.voaindonesia.com/a/pasukan-militer-bersama-g5-sahel-akan-tangani-terorisme/4099850.html>.

VOA Indonesia. 2019. "PBB: Krisis Kemanusiaan di Sahel Afrika Memuncak."

2019.

<https://www.voaindonesia.com/a/pbb-krisis-kemanusiaan-di-sahel-afrika-memuncak/5173371.html>.

Yusuf, Muhammed. n.d. "Violent Extremism in the Sahel | Global Conflict Tracker."

Council on Foreign Relations. Accessed December 10, 2024.

<https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violent-extremism-sahel>.